

LAPORAN KINERJA



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Bersyukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat serta nikmat dariNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 pada waktunya. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah menyusun Laporan Kinerja dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun 2017, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna dalam perbaikan dimas yang akan datang.

Atas nama seluruh jajaran Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau.

Pekanbaru, Januari 2018

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau

Ir.H.HERMAN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630512 199303 1 006

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktural Organisasi	2
1.2.1. Tugas Pokok	2
1.2.2. Fungsi	3
1.2.3. Struktur Organisasi	3
1.3. Sistematika Penulisan	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	9
2.2. Tujuan	10
2.3. Sasaran Strategis	12
2.4. Program Kerja	14
2.5. Strategi dan Kebijakan	19
2.6. Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Metodologi Pengukuran Kinerja	23
3.2. Analisis Pencapaian Kinerja	24
3.2.1. Keragaan Sumberdaya Manusia Dinas Kelautan Dan Perikanan	25
3.2.2. Potensi dan Permasalahan	27
3.3. Analisis Pengukuran Kinerja	28
3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun Sebelumnya	38
3.5. Akuntabilitas Keuangan	41
BAB IV. PENUTUP	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
2.1. Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017	21
3.1. Jumlah SDM menurut Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017.....	26
3.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
3.3. Kategori Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017	30
3.4. Capaian Jumlah Produksi Perikanan dan Kelautan (Ton) Tahun 2017	31
3.5. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017	32
3.6. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017	34
3.7. NTN (Nilai Tukar Nelayan) Tahun 2017	34
3.8. NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tahun 2017	34
3.9. Angka Konsumsi Ikan Provinsi Riau Tahun 2017	35
3.10. Perbandingan Angka Konsumsi Ikan per Kapita Per Tahun 2017 Se-Provinsi Riau	35
3.11. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US) Tahun 2017	36
3.12. Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Tahu 2017 Di Provinsi Riau	37
3.13. Persentase Menurunnya IUU Fishing (%) Provinsi Riau Tahun 2017	38
3.14. Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2016 dan 2017	38
3.15. Perbandingan Target Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 2017	39
3.16. Perbandingan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 dengan Target Akhir Periode IKU (Tahun 2018).....	40

Lanjutan Tabel..

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
3.17. Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017	40
3.18. Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017	41
3.19. Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Bidang/UPT Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017	61
3.20. Perbandingan Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2016-2017	62

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>	<i>Halaman</i>
3.1. Persentase Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017	26
3.2. Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Per Bidang/UPT Tahun 2017	61

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran</i>	<i>Halaman</i>
1. Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	64
2. Realisasi Anggaran Tahun 2017 1 Januari s/d 31 Desember 2017	65

“ Eksekutif Summary “

Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2017 dalam rangka memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh dan dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2017 berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Capaian kinerja Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau memiliki sasaran strategis yaitu:

1. MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Dengan indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Jumlah produksi perikanan dan kelautan (ton)
2. NTN (Nilai Tukar Nelayan)
3. NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)
4. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)
5. Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$)

2. MENURUNNYA TINGKAT ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING

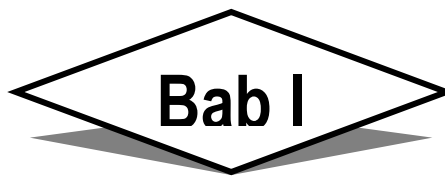
Dengan indikator Kinerja Utama (IKU):

6. Meningkatnya Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah/ Luas Kawasan (ha)

7. Persentase Menurunnya IUU Fishing (%)

Evaluasi kinerja program prioritas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Jumlah produksi perikanan dan kelautan (ton) target 246.023,23 ton terealisasi 248.704,30 ton dengan persentase tingkat capaian 141,74 %.
 2. NTN (Nilai Tukar Nelayan) target 103,34 terealisasi 120,95 dengan persentase tingkat capaian 117,04.
 3. NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan) target 42 terealisasi 40 dengan persentase tingkat capaian 95,24 %.
 4. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) target 42 Kg Perkapita terealisasi 40 kg Perkapita dengan persentase tingkat capaian 95,24 %.
 5. Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$) target 8.500.000 US \$ terealisasi 4.310.000 US \$ dengan persentase tingkat capaian 47,90 %.
 6. Meningkatnya Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah/ Luas Kawasan (ha) target 42 Ha terealisasi 269.919,76 ha dengan persentase tingkat pencapaian 642.425,62 %
 7. Persentase Menurunnya IUU Fishing target 15 % terealisasi 13,5 % dengan persentase tingkat pencapaian 90 %.
-



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dibingkai dalam kerangka *Pro-Poor* (pengentasan kemiskinan), *Pro-Job* (penyerapan tenaga kerja), *Pro-growth* (pertumbuhan) dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan) yang menekankan pada pendayagunaan sumberdaya perikanan dan kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan terpeliharanya daya dukung ekosistem perairan dan sumberdaya hayati secara seimbang merupakan bagian dari Program Kerja Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2014 – 2019.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau merupakan upaya pemberian berbagai alternatif pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan (*welfare*) hidupnya, sekaligus upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat pembudidaya ikan, nelayan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan basis komoditas lokal yang kompetitif berlandaskan kemampuan regional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Sebagai acuan untuk mengarahkan kelautan dan perikanan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 – 2019. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut telah memuat indikator kinerja dan target yang diurai per tahun serta rencana indikasi pendanaannya.

Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan

dalam rencana strategis. Dalam penyusunan ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai unit kerja pemerintah daerah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas, dimana setiap penyelenggaraan negara harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat dan penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dinyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai perangkat daerah yang diserahkan tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

1.2.1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Bidang Kelautan dan Pengawasan serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Bidang Kelautan dan Pengawasan ;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Bidang Kelautan dan Pengawasan ;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Bidang Kelautan dan Pengawasan ;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (lembaran Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor (8/291/2016) dan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 84).

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ;**
- 2. Sekretariat**, terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan barang Milik Daerah ; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

3. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas :

- a. Seksi Produksi dan usaha Budidaya;
- b. Seksi Pengembangan kawasan Budidaya ; dan
- c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

4. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas :

- a. Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Perairan;
- b. Seksi Kenelayanan; dan
- c. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan.

5. Bidang Kelautan dan pengawasan, terdiri atas :

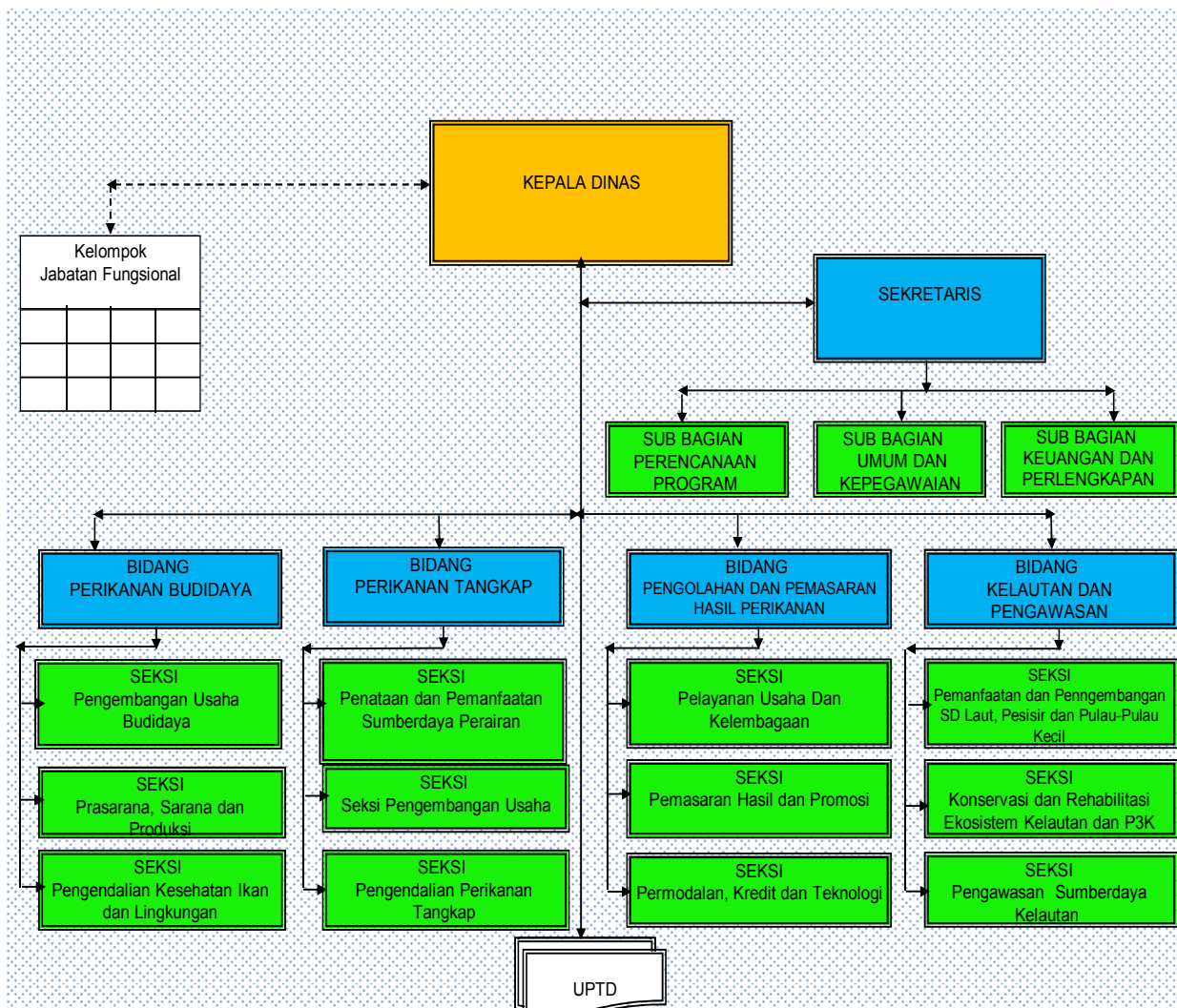
- a. Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem ; dan
- c. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :

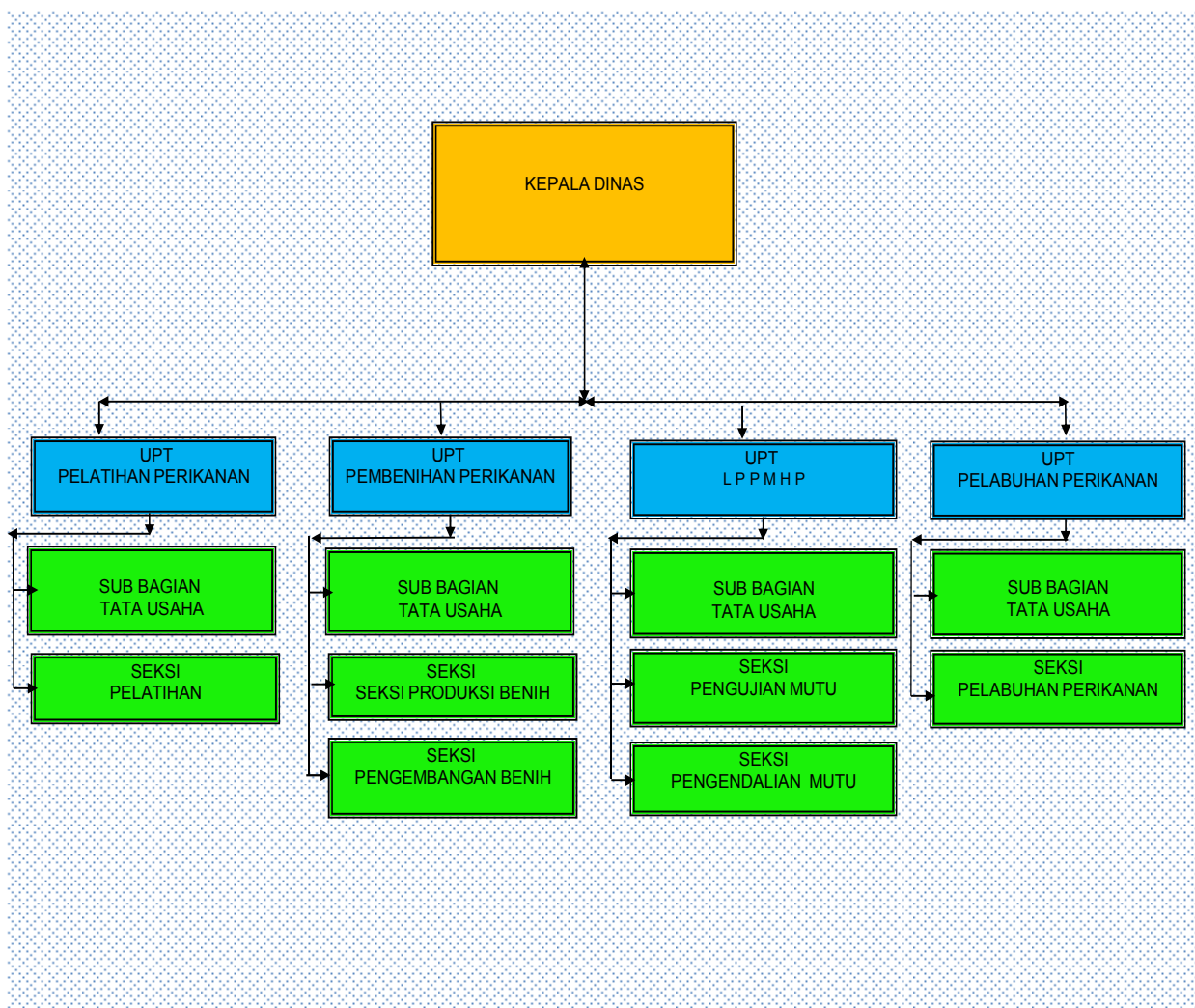
- a. Seksi Usaha dan Kelembagaan;
- b. Seksi Pembinaan Mutu Produk; dan
- c. Seksi Pemasaran dan Promosi.

7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), terdiri atas :

- a. UPT. Pelatihan Perikanan
- b. UPT. Pembenihan Perikanan
- c. UPT. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)
- d. UPT. Pelabuhan Perikanan



Selanjutnya untuk menangani masalah-masalah teknis tertentu seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat; perbenihan; laboratorium; dan pelabuhan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.



1.3. Sistematika Penyampaian Laporan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan pencapaian kinerja untuk mengukur keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Sebagai bentuk realisasi pelaksanaan kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dibuat LAKIP yang disusun berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017 yang dijadikan sebagai dasar perbaikan terhadap mekanisme kinerja di masa mendatang. Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

BAB - I

Pendahuluan, yang menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mencakup Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

BAB - II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan tentang kebijakan, Strategi Pendekatan dan Program Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

BAB - III

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 sekaligus sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada publik terhadap pelaksanaan dan pencapaian sasaran strategis pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

BAB - IV

Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017.



Bab II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Perencanaan Kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Hal ini memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Rencana strategis yang disusun oleh instansi pemerintah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah mengupayakan penyusunan Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun, yaitu untuk tahun 2014 – 2019 terstruktur dan tersaji secara baik dan visi

sampai dengan program. Rencana strategis yang telah tersusun secara baik (terstruktur) adalah mulai dari visi sampai dengan sasaran, dengan demikian kaitan antara sasaran dengan program/ kegiatan terlihat secara tegas. Untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melibatkan seluruh komponen yang ada di Dinas sehingga sepenuhnya menggambarkan sebagai suatu komitmen bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk mewujudkan kinerja aparatur dan kelembagaan yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel dan mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, visi, isi, tujuan, sasaran strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2014 – 2019 dan Penetapan Kinerja 2017 ditetapkan sebagai berikut :

2.1. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Perikanan dan Kelautan Riau yang tangguh dan serta lestari tahun 2020.”

Penjabaran formulasi visi pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perikanan dan Kelautan yang berdaya saing, berarti produk perikanan dan kelautan mampu menghasilkan produk yang continue, berkualitas unggul secara kompetitif dan komparatif.
2. Perikanan dan Kelautan yang berkelanjutan, artinya produk perikanan dan kelautan mampu bertahan dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis dengan menggunakan sumberdaya terbarukan.

-
3. Kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, artinya nelayan dan pembudidaya ikan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan mampu memenuhi kewajibannya sebagai makhluk sosialnya.

Melalui visi tersebut diharapkan dapat terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap produk perikanan dan kelautan sehingga memiliki daya saing yang tinggi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, maka misi yang diemban oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan,
2. Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan,
3. Meningkatkan mutu pengolahan serta pemasaran hasil perikanan,
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan,
5. Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif, lapangan kerja yang produktif, peran aktif masyarakat dan dunia usaha perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan,
6. Meningkatkan pemantauan, pengendalian dan pengawas sumberdaya perikanan dan kelautan,
7. Meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan dan kelautan dan
8. Meningkatkan kerjasama antar provinsi, Kabupaten/Kota.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan perikanan dan kelautan 2014-2019 yang dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pelaku perikanan dan kelautan,
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur,

-
3. Meningkatnya disiplin aparaturnya,
 4. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparaturnya,
 5. Terkendalinya produksi perikanan tangkap di laut,
 6. Terkendalinya produksi perikanan tangkap di perairan umum,
 7. Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan,
 8. Meningkatnya mutu pengolahan serta pemasaran hasil perikanan,
 9. Meningkatnya ragam pengolahan hasil perikanan,
 10. Meningkatnya peluang pasar hasil perikanan,
 11. Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan budidaya,
 12. Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap,
 13. Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan,
 14. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di bidang perikanan,
 15. Meningkatnya penyerapan dana perbankan di bidang perikanan,
 16. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di bidang perikanan,
 17. Meningkatnya konsumsi ikan/ kapita/ tahun,
 18. Terlaksananya pemantauan, sumberdaya perikanan dan kelautan,
 19. Terlaksananya pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan,
 20. Terlaksananya pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan,
 21. Meningkatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan,
 22. Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Perikanan dan Kelautan,
 23. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan,
 24. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan,
 25. Terlaksananya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan program pembangunan perikanan dan kelautan,
 26. Tersusunnya program pembangunan perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan institusi perikanan dan kelautan yang ada di Provinsi Riau.

2.3. Sasaran Strategis

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2017. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis yang dimuat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton)
2. Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)
3. Meningkatnya area konsumsi ikan di Provinsi Riau (kg/kapita/tahun)
4. Meningkatnya luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (ha)
5. Meningkatnya kualitas SDM bidang perikanan dan kelautan (orang).

Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perikanan dan kelautan periode 2014 – 2019 ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Menyempurnakan pra kondisi pembangunan perikanan melalui penyediaan data pengelolaan serta penetapan peruntukannya sesuai dengan fungsinya,
2. Meningkatkan produksi perikanan untuk memenuhi gizi dan memperluas lapangan kerja, melalui ekstentifikasi dan itensifikasi serta diversifikasi usaha,
3. Pengembangan kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan,
4. Mengoptimalkan peran KPR/UPR untuk mampu memproduksi benih yang tepat waktu sesuai dengan kebutuhan,
5. Menunjang penganekaragaman produk hasil olahan yang dapat meningkatkan penghasilan dan pendapatan keluarga,
6. Pengembangan permodalan dengan kemudahan akses terhadap perbankan,
7. Pengembangan diversifikasi dan peningkatan kualitas produk hasil perikanan,
8. Mendorong terciptanya suasana berusaha yang kondusif,

-
9. Meningkatkan kemitraan perikanan dengan badan usaha dalam upaya perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja,
 10. Mengoptimalkan petugas KKMB
 11. Promosi hasil studi pengembangan usaha yang sudah tersedia,
 12. Promosi usaha,
 13. Penyempurnaan dan pemantapan aparatur dan sarana untuk meningkatkan daya kemampuan melaksanakan kegiatan pengelolaan pembangunan agar tercapai efisiensi, efektifitas dan mutu kerja yang tinggi dalam rangka mencapai hasil pembangunan yang optimal,
 14. Meningkatkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan perikanan,
 15. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu untuk dapat mengatur dan mengelola penggunaan lahan secara bijaksana,
 16. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian konservasi dan pelestarian sumberdaya perikanan,
 17. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian disiplin aparatur, pendidikan dan pelatihan pegawai dan penyediaan sarana prasarana penunjang kegiatan,
 18. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan perikanan dengan institusi perikanan di tingkat pusat maupun kabupaten/ kota dan melibatkan SKPD terkait,
 19. Memberikan akses kepada masyarakat pesisir untuk mendapat kesempatan berpartisipasi/ ikut serta yang lebih besar dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pengamanan dan pengawasan sumberdaya perikanan,
 20. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan,
 21. Penyempurnaan sarana dan prasarana produksi,
 22. Perlindungan dan pengamanan tindak pengrusakan sumberdaya perikanan dan melakukan operasi dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku pengrusakan sumberdaya perikanan.

Adapun kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang perikanan dan kelautan adalah melakukan pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui pengembangan prasarana wilayah, peningkatan kualitas SDM, pemantapan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Program Kerja

Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2017 dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan diimplementasikan ke dalam 12 (Dua Belas) program sebagai berikut :

Program

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
4. Program Pembangunan Budidaya Perikanan
5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
6. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan
7. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan

Penunjang

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Implementasi Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bertujuan agar terselenggaranya administrasi perkantoran dengan sasaran tertibnya administrasi perkantoran. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

-
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
 - g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
 - l. Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi Publikasi dan Kehumasan SKPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan dari program yaitu meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dengan sasaran kenyamanan dan keamanan aparatur dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Meubeleur
 - c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan program adalah meningkatnya disiplin aparatur dengan sasaran peningkatan kesehatan jasmani dan rohani aparatur. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 - b. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan program adalah mengawal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di rencanakan serta meningkatkan sistem pelaporan dengan sasaran tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan, laporan tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
 - d. Rapat Koordinasi pada Setiap SKPD
 - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - f. Supervisi dan Statistik
6. Program Perencanaan Tata Ruang
- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
- a. Penyusunan Pecdangan Kawasan Konservasi
 - b. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove
8. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian POKMASWAS
 - b. Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu
 - c. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK)
 - e. Pembangunan Pos Pengawas
9. Program Pembangunan Budidaya Perikanan

Tujuan program adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan volume dan nilai produksi perikanan budidaya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

-
- a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
 - b. Revitalisasi Kawasan Budidaya Air Laut, Payau dan Tawar
 - c. Peningkatan Sistem dan cara Pengelolaan Laboratorium UPT Pembenihan
 - d. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan
 - e. Pembenihan Ikan Langka/Lokal yang Mempunyai Nilai Ekonomi Tinggi
 - f. Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya
 - g. Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya
 - h. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima Bantuan PUMP PB
 - i. Pembinaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan
 - j. Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan Kinerja UPTD Se-Provinsi Riau
 - k. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan
 - l. Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan
 - m. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pembenihan
 - n. Pengelolaan Perizinan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau
 - o. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan (DAK)
 - p. Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Hibah Tahun 2018

10. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Tujuan program adalah meningkatkan produktifitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkapan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak
- b. Pembinaan dan Operasional Forum KUB Perikanan Tangkap
- c. Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum
- d. Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodalan Perikanan Tangkap
- e. Pengolahan Perairan Teritorial di WPP

-
- f. Pengelolaan Perizinan Tangkap di Provinsi Riau

11. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

Tujuan program adalah meningkatnya produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah, nilai produk hasil perikanan non konsumsi. Konsumsi ikan per kapita, nilai ekspor hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan produk perikanan prima yang berdaya saing. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Lomba dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM Terbaik se Provinsi Riau
- b. Peningkatan Kapasitas dan Operasional LPPMHP
- c. Pengembangan Nilai Produk Pengolahan Hasil Perikanan
- d. Pendampingan Usaha UMKM Pengolahan Hasil Perikanan dengan Pengusaha Pemasaran
- e. Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan
- f. Pameran/Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan
- g. Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan
- h. Sosialisasi GEMARIKAN Melalui Media Elektronik dan Cetak

12. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan

Tujuan program adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan dengan sasaran meningkatnya kompetensi sumberdaya pelaku yang berusaha di bidang kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan
- c. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan

2.5. Strategi dan Kebijakan

Strategi Dan Arah Kebijakan

1. Sasaran Strategis

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2017. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis yang dimuat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Perikanan dan Kelautan Yang Mandiri.
2. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan

Arah dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan periode 2014 -2018 ditetapkan arah sebagai berikut :

1. Menyempurnakan prakondisi pembangunan perikanan melalui penyediaan data pengelolaan serta penetapan peruntukannya sesuai dengan fungsinya.
2. Meningkatkan produksi perikanan untuk memenuhi gizi dan memperluas lapangan kerja, melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta diversifikasi usaha.
3. Pengembangan kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan.
4. Mengoptimalkan peran KPR/UPR untuk mampu memproduksi benih yang tepat waktu sesuai dengan kebutuhan.
5. Menunjang penganekaragaman produk hasil olahan yang dapat meningkatkan penghasilan dan pendapatan keluarga.
6. Pengembangan permodalan dengan kemudahan akses terhadap perbankan.
7. Pengembangan diversifikasi dan peningkatan kualitas produk hasil perikanan.
8. Mendorong terciptanya suasana berusaha yang kondusif.

-
9. Meningkatkan kemitraan perikanan dengan badan usaha dalam upaya perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja
 10. Mengoptimalkan petugas KKMB.
 11. Promosi hasil studi pengembangan usaha yang sudah tersedia.
 12. Promosi usaha
 13. Penyempurnaan dan pemantapan aparatur dan sarana untuk meningkatkan daya kemampuan melaksanakan kegiatan pengelolaan pembangunan agar tercapai efisiensi, efektivitas dan mutu kerja yang tinggi dalam rangka mencapai hasil pembangunan yang optimal.
 14. Meningkatkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan perikanan.
 15. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu untuk dapat mengatur dan mengelola penggunaan lahan secara bijaksana.
 16. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian konservasi dan pelestarian sumber daya perikanan.
 17. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian disiplin aparatur, pendidikan dan pelatihan pegawai dan penyediaan sarana prasarana penunjang kegiatan.
 18. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan perikanan dengan institusi perikanan di tingkat pusat maupun kabupaten/ kota dan melibatkan SKPD terkait.
 19. Memberikan akses kepada masyarakat pesisir untuk mendapat kesempatan berpartisipasi / ikut serta yang lebih besar dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan serta pengamanan dan pengawasan sumberdaya perikanan.
 20. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan
 21. Penyempurnaan sarana dan prasarana produksi.
 22. Perlindungan dan pengamanan tindak pengrusakan sumberdaya perikanan dan melakukan operasi dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku perusakan sumberdaya perikanan.

Adapun kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang kelautan dan perikanan adalah melakukan pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui pengembangan prasarana wilayah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemantapan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.6. Rencana Kerja Tahunan Dan Penetapan Kinerja

Mengacu pada tugas pokok, fungsi dan Pernyataan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 2014-2019 maka setiap tahun ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan 2017 tertuang pada tabel berikut.

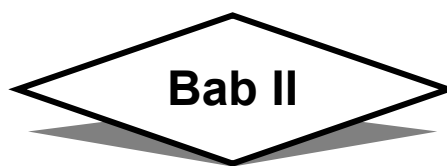
Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan kesejahteraan pelaku perikanan dan kelautan yang mandiri	Nilai Tukar Petani (Nelayan)	103,35 (%)
		Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun	42,06 kg/th
2	Meningkatkan pengolahan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan	Produksi perikanan (ton)	246.023,02 (Ton)

Sedangkan program dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

PROGRAM		ANGGARAN	KET
1.	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp. 2.888.050.000,00	APBD
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Dan Kelautan	Rp. 4.190.800.000,00	APBD
3.	Program Pengembangan Perikanan	Rp. 2.165.610.000,00	APBD

	Tangkap		
4.	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 672.485.000,00	APBD
5.	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Laut	Rp. 2.981.497.000,00	APBD
6.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp. 16.028.515.400,00	APBD
7.	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Rp. 372.470.000,00	APBN (DAK)
8.	Pengolahan Perikanan Tangkap	Rp. 476.867.000,00	APBN (DAK)
9.	Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Rp. 525.000.000.00	APBN (TP)



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Perencanaan Kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Hal ini memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Rencana strategis yang disusun oleh instansi pemerintah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah mengupayakan penyusunan Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun, yaitu untuk tahun 2014 – 2019 terstruktur dan tersaji secara baik dan visi sampai dengan program. Rencana strategis yang telah tersusun secara baik

(terstruktur) adalah mulai dari visi sampai dengan sasaran, dengan demikian kaitan antara sasaran dengan program/ kegiatan terlihat secara tegas. Untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melibatkan seluruh komponen yang ada di Dinas sehingga sepenuhnya menggambarkan sebagai suatu komitmen bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk mewujudkan kinerja aparatur dan kelembagaan yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel dan mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, visi, isi, tujuan, sasaran strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2014 – 2019 dan Penetapan Kinerja 2017 ditetapkan sebagai berikut :

2.1. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Perikanan dan Kelautan Riau yang tangguh dan serta lestari tahun 2020.”

Penjabaran formulasi visi pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perikanan dan Kelautan yang berdaya saing, berarti produk perikanan dan kelautan mampu menghasilkan produk yang continue, berkualitas unggul secara kompetitif dan komparatif.
2. Perikanan dan Kelautan yang berkelanjutan, artinya produk perikanan dan kelautan mampu bertahan dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis dengan menggunakan sumberdaya terbarukan.

-
3. Kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, artinya nelayan dan pembudidaya ikan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan mampu memenuhi kewajibannya sebagai makhluk sosialnya.

Melalui visi tersebut diharapkan dapat terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap produk perikanan dan kelautan sehingga memiliki daya saing yang tinggi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, maka misi yang diemban oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan,
2. Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan,
3. Meningkatkan mutu pengolahan serta pemasaran hasil perikanan,
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan,
5. Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif, lapangan kerja yang produktif, peran aktif masyarakat dan dunia usaha perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan,
6. Meningkatkan pemantauan, pengendalian dan pengawas sumberdaya perikanan dan kelautan,
7. Meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan dan kelautan dan
8. Meningkatkan kerjasama antar provinsi, Kabupaten/Kota.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan perikanan dan kelautan 2014-2019 yang dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pelaku perikanan dan kelautan,

-
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur,
 3. Meningkatnya disiplin aparatur,
 4. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur,
 5. Terkendalinya produksi perikanan tangkap di laut,
 6. Terkendalinya produksi perikanan tangkap di perairan umum,
 7. Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan,
 8. Meningkatnya mutu pengolahan serta pemasaran hasil perikanan,
 9. Meningkatnya ragam pengolahan hasil perikanan,
 10. Meningkatnya peluang pasar hasil perikanan,
 11. Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan budidaya,
 12. Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap,
 13. Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan,
 14. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di bidang perikanan,
 15. Meningkatnya penyerapan dana perbankan di bidang perikanan,
 16. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di bidang perikanan,
 17. Meningkatnya konsumsi ikan/ kapita/ tahun,
 18. Terlaksananya pemantauan, sumberdaya perikanan dan kelautan,
 19. Terlaksananya pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan,
 20. Terlaksananya pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan,
 21. Meningkatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan,
 22. Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Perikanan dan Kelautan,
 23. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan,
 24. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan,
 25. Terlaksananya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan program pembangunan perikanan dan kelautan,
 26. Tersusunnya program pembangunan perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan institusi perikanan dan kelautan yang ada di Provinsi Riau.

2.3. Sasaran Strategis

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2017. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis yang dimuat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton)
2. Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)
3. Meningkatnya area konsumsi ikan di Provinsi Riau (kg/kapita/tahun)
4. Meningkatnya luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (ha)
5. Meningkatnya kualitas SDM bidang perikanan dan kelautan (orang).

Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perikanan dan kelautan periode 2014 – 2019 ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Menyempurnakan pra kondisi pembangunan perikanan melalui penyediaan data pengelolaan serta penetapan peruntukannya sesuai dengan fungsinya,
2. Meningkatkan produksi perikanan untuk memenuhi gizi dan memperluas lapangan kerja, melalui ekstentifikasi dan itensifikasi serta diversifikasi usaha,
3. Pengembangan kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan,
4. Mengoptimalkan peran KPR/UPR untuk mampu memproduksi benih yang tepat waktu sesuai dengan kebutuhan,
5. Menunjang penganekaragaman produk hasil olahan yang dapat meningkatkan penghasilan dan pendapatan keluarga,
6. Pengembangan permodalan dengan kemudahan akses terhadap perbankan,
7. Pengembangan diversifikasi dan peningkatan kualitas produk hasil perikanan,
8. Mendorong terciptanya suasana berusaha yang kondusif,

-
9. Meningkatkan kemitraan perikanan dengan badan usaha dalam upaya perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja,
 10. Mengoptimalkan petugas KKMB
 11. Promosi hasil studi pengembangan usaha yang sudah tersedia,
 12. Promosi usaha,
 13. Penyempurnaan dan pemantapan aparatur dan sarana untuk meningkatkan daya kemampuan melaksanakan kegiatan pengelolaan pembangunan agar tercapai efisiensi, efektifitas dan mutu kerja yang tinggi dalam rangka mencapai hasil pembangunan yang optimal,
 14. Meningkatkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan perikanan,
 15. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu untuk dapat mengatur dan mengelola penggunaan lahan secara bijaksana,
 16. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian konservasi dan pelestarian sumberdaya perikanan,
 17. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian disiplin aparatur, pendidikan dan pelatihan pegawai dan penyediaan sarana prasarana penunjang kegiatan,
 18. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan perikanan dengan institusi perikanan di tingkat pusat maupun kabupaten/ kota dan melibatkan SKPD terkait,
 19. Memberikan akses kepada masyarakat pesisir untuk mendapat kesempatan berpartisipasi/ ikut serta yang lebih besar dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pengamanan dan pengawasan sumberdaya perikanan,
 20. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan,
 21. Penyempurnaan sarana dan prasarana produksi,
 22. Perlindungan dan pengamanan tindak pengrusakan sumberdaya perikanan dan melakukan operasi dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku pengrusakan sumberdaya perikanan.

Adapun kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang perikanan dan kelautan adalah melakukan pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui pengembangan prasarana wilayah, peningkatan kualitas SDM, pemantapan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Program Kerja

Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2017 dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan diimplementasikan ke dalam 12 (Dua Belas) program sebagai berikut :

Program

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
4. Program Pembangunan Budidaya Perikanan
5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
6. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan
7. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan

Penunjang

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Implementasi Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bertujuan agar terselenggaranya administrasi perkantoran dengan sasaran tertibnya administrasi perkantoran. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

-
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
 - g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
 - l. Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi Publikasi dan Kehumasan SKPD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan dari program yaitu meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dengan sasaran kenyamanan dan keamanan aparatur dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Meubeleur
 - c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan program adalah meningkatnya disiplin aparatur dengan sasaran peningkatan kesehatan jasmani dan rohani aparatur. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

 - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 - b. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-

Tujuan program adalah mengawal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di rencanakan serta meningkatkan sistem pelaporan dengan sasaran tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan, laporan tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
 - d. Rapat Koordinasi pada Setiap SKPD
 - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - f. Supervisi dan Statistik
6. Program Perencanaan Tata Ruang
- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
- a. Penyusunan Pecdangan Kawasan Konservasi
 - b. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove
8. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian POKMASWAS
 - b. Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu
 - c. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK)
 - e. Pembangunan Pos Pengawas
9. Program Pembangunan Budidaya Perikanan

Tujuan program adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan volume dan nilai produksi perikanan budidaya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

-
- a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
 - b. Revitalisasi Kawasan Budidaya Air Laut, Payau dan Tawar
 - c. Peningkatan Sistem dan cara Pengelolaan Laboratorium UPT Pembenihan
 - d. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan
 - e. Pembenihan Ikan Langka/Lokal yang Mempunyai Nilai Ekonomi Tinggi
 - f. Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya
 - g. Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya
 - h. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima Bantuan PUMP PB
 - i. Pembinaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan
 - j. Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan Kinerja UPTD Se-Provinsi Riau
 - k. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan
 - l. Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan
 - m. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pembenihan
 - n. Pengelolaan Perizinan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau
 - o. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan (DAK)
 - p. Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Hibah Tahun 2018

10. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Tujuan program adalah meningkatkan produktifitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkapan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak
- b. Pembinaan dan Operasional Forum KUB Perikanan Tangkap
- c. Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum
- d. Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodalan Perikanan Tangkap

-
- e. Pengolahan Perairan Teritorial di WPP
 - f. Pengelolaan Perizinan Tangkap di Provinsi Riau

11. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

Tujuan program adalah meningkatnya produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah, nilai produk hasil perikanan non konsumsi. Konsumsi ikan per kapita, nilai ekspor hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan produk perikanan prima yang berdaya saing. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Lomba dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM Terbaik se Provinsi Riau
- b. Peningkatan Kapasitas dan Operasional LPPMHP
- c. Pengembangan Nilai Produk Pengolahan Hasil Perikanan
- d. Pendampingan Usaha UMKM Pengolahan Hasil Perikanan dengan Pengusaha Pemasaran
- e. Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan
- f. Pameran/Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan
- g. Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan
- h. Sosialisasi GEMARIKAN Melalui Media Elektronik dan Cetak

12. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan

Tujuan program adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan dengan sasaran meningkatnya kompetensi sumberdaya pelaku yang berusaha di bidang kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan
- c. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan

2.5. Strategi dan Kebijakan

Strategi Dan Arah Kebijakan

1. Sasaran Strategis

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2017. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis yang dimuat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Perikanan dan Kelautan Yang Mandiri.
2. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan

Arah dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan periode 2014 -2018 ditetapkan arah sebagai berikut :

1. Menyempurnakan prakondisi pembangunan perikanan melalui penyediaan data pengelolaan serta penetapan peruntukannya sesuai dengan fungsinya.
2. Meningkatkan produksi perikanan untuk memenuhi gizi dan memperluas lapangan kerja, melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta diversifikasi usaha.
3. Pengembangan kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan.
4. Mengoptimalkan peran KPR/UPR untuk mampu memproduksi benih yang tepat waktu sesuai dengan kebutuhan.
5. Menunjang penganeekaragaman produk hasil olahan yang dapat meningkatkan penghasilan dan pendapatan keluarga.
6. Pengembangan permodalan dengan kemudahan akses terhadap perbankan.
7. Pengembangan diversifikasi dan peningkatan kualitas produk hasil perikanan.
8. Mendorong terciptanya suasana berusaha yang kondusif.

-
9. Meningkatkan kemitraan perikanan dengan badan usaha dalam upaya perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja
 10. Mengoptimalkan petugas KKMB.
 11. Promosi hasil studi pengembangan usaha yang sudah tersedia.
 12. Promosi usaha
 13. Penyempurnaan dan pemantapan aparatur dan sarana untuk meningkatkan daya kemampuan melaksanakan kegiatan pengelolaan pembangunan agar tercapai efisiensi, efektivitas dan mutu kerja yang tinggi dalam rangka mencapai hasil pembangunan yang optimal.
 14. Meningkatkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan perikanan.
 15. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu untuk dapat mengatur dan mengelola penggunaan lahan secara bijaksana.
 16. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian konservasi dan pelestarian sumber daya perikanan.
 17. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian disiplin aparatur, pendidikan dan pelatihan pegawai dan penyediaan sarana prasarana penunjang kegiatan.
 18. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan perikanan dengan institusi perikanan di tingkat pusat maupun kabupaten/ kota dan melibatkan SKPD terkait.
 19. Memberikan akses kepada masyarakat pesisir untuk mendapat kesempatan berpartisipasi / ikut serta yang lebih besar dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan serta pengamanan dan pengawasan sumberdaya perikanan.
 20. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan
 21. Penyempurnaan sarana dan prasarana produksi.
 22. Perlindungan dan pengamanan tindak pengrusakan sumberdaya perikanan dan melakukan operasi dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku perusakan sumberdaya perikanan.

Adapun kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang kelautan dan perikanan adalah melakukan pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui pengembangan prasarana wilayah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemantapan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.6. Rencana Kerja Tahunan Dan Penetapan Kinerja

Mengacu pada tugas pokok, fungsi dan Pernyataan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 2014-2019 maka setiap tahun ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan 2017 tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan kesejahteraan pelaku perikanan dan kelautan yang mandiri	Nilai Tukar Petani (Nelayan)	103,35 (%)
		Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun	42,06 kg/th
2	Meningkatkan pengolahan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan	Produksi perikanan (ton)	246.023,02 (Ton)

Sedangkan program dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

PROGRAM		ANGGARAN	KET
1.	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp. 2.888.050.000,00	APBD
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Dan Kelautan	Rp. 4.190.800.000,00	APBD
3.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp. 2.165.610.000,00	APBD

4.	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 672.485.000,00	APBD
5.	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Laut	Rp. 2.981.497.000,00	APBD
6.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp. 16.028.515.400,00	APBD
7.	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Rp. 372.470.000,00	APBN (DAK)
8.	Pengolahan Perikanan Tangkap	Rp. 476.867.000,00	APBN (DAK)
9.	Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Rp. 525.000.000.00	APBN (TP)

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Kinerja

Metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja Pembangunan kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 adalah membandingkan capaian sasaran tahunan dengan rencana kinerja tahunan sehingga diperoleh nilai tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran. Nilai tingkat keberhasilan dimaksud digunakan untuk pendalaman terhadap struktur permasalahan yang melatar belakangi pencapaian nilai.

Pendalaman struktur permasalahan merupakan langkah evaluasi terhadap proses pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang dimulai dari proses inventarisasi dan identifikasi masalah, mekanisme perumusan dan formulasi pemecahan masalah serta mekanisme penyusunan strategi kebijakan pembangunan di provinsi Riau.

Metodologi pengukuran kinerja tersebut merupakan salah satu proses dalam penyusunan LAKIP sehingga dapat memberikan gambaran kepada stakeholders kondisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan upaya organisasi untuk mewujudkan tujuan serta sasaran pembangunan sebagai bagian dalam Pembangunan Daerah.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Input (masukan), adalah segala sesuatu sumber daya yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran sumber daya manusia, informasi, kebijakan, peralatan dan material.

-
2. Indikator Kinerja Output (keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan, indikator output dapat berupa fisik maupun non fisik.
 3. Indikator Kinerja Outcome (hasil), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah sebagai gambaran dari efek langsung kegiatan.
 4. Indikator Kinerja Benefit (manfaat), adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan serta merupakan gambaran manfaat yang terjadi dari pelaksanaan kegiatan.
 5. Indikator Kinerja Impact (dampak), adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh rangkaian proses kegiatan yang dapat berupa pengaruh positif maupun negatif. Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperbandingkan Capaian Kinerja Tahun 2016 terhadap Tujuan Kinerja yang telah ditetapkan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai di Tahun 2017. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis yang dimuat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017.

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan melaporkan pelaksanaan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, dan menyampaikan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Riau.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2017 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau kepada Gubernur Riau atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan

Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau selama tahun 2017. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

3.2.1. Keragaan Sumberdaya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan

Tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja suatu organisasi.

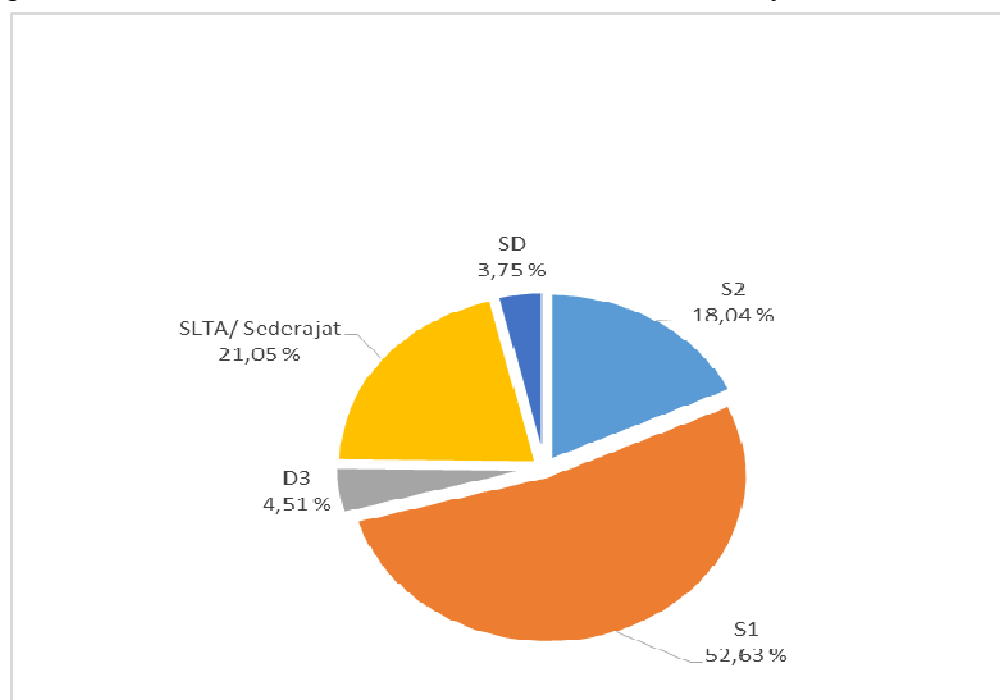
Jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau per 31 Desember 2017 berjumlah 133 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai menurut unit kerja : Sekretariat 29 orang, Bidang Perikanan Budidaya 9 orang, Bidang Perikanan Tangkap 13 orang, Bidang Kelautan dan Pengawasan 13 orang, Bidang P2HP 12 orang, UPT Pembenihan Perikanan 13 orang, UPT Pelatihan 20 orang, UPT Pelabuhan Perikanan 5 orang, UPT LPPMHP 11 orang, Penyuluh Perikanan 8 orang.
2. Jumlah pegawai menurut golongan : Golongan IV sebanyak 27 orang, Golongan III sebanyak 82 orang, Golongan II sebanyak 22 orang dan golongan I sebanyak 2 orang.
3. Jumlah pegawai menurut jabatan : Jabatan Eselon II sebanyak 1 orang, Jabatan Eselon III sebanyak 9 orang, eselon IV sebanyak 25 orang dan non eselon 98 orang.
4. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan : S-2 sebanyak 22 orang atau 16,54 %, S-1 sebanyak 69 orang atau 54,39 %, D-III sebanyak 5 orang atau 4,51 %, SLTA sebanyak 17 orang atau 19,55 % dan SD sebanyak 2 orang atau 3,01 %.
5. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin : laki-laki sebanyak 79 orang atau 59,39 %, sedangkan perempuan sebanyak 54 orang atau 40,60 %.

Tabel 3.1. Jumlah SDM menurut Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai				Jumlah	Jabatan Struktural			
		PNS Golongan					Eselon			Non Eselon
		IV	III	II	I		II	III	IV	
1	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	S2	17	7	-	-	24	1	6	7	9
3	S1	10	60	-	-	70	-	3	12	43
4	D4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	D3	-	2	4	-	6	-	-	-	6
6	D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SLTA	-	11	17	-	28	-	-	-	28
9	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SD	-	-	3	2	5	-	-	-	5
Jumlah		27	80	24	2	133	1	9	19	91

Persentase Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 Berdasarkan Jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu:



Gambar 3.1. Persentase Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017

3.2.2. Potensi dan Permasalahan Tahun 2017

Permasalahan

Adapun permasalahan-permasalahan yang ada pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau pada tahun 2017 sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Riau belum dapat menyelesaikan seluruh permasalahan pokok diantaranya adalah kemiskinan nelayan dan pencemaran lingkungan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta keterbatasan sarana dan prasarana;
- 2) Terjadinya inflasi harga-harga kebutuhan bahan pokok yang menyebabkan harga bahan baku pakan ikan ikut melonjak dan berakibat pada semakin tingginya biaya produksi;
- 3) Masih rendahnya nilai tambah budidaya perikanan karena sebagian besar masih dijual berupa ikan segar, belum berupa hasil industri sebagaimana yang kita harapkan;
- 4) Masih terjadi *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hilir yang menggunakan pukat harimau (Trawl), cantrang, dan lampara yang berpotensi menimbulkan konflik antara nelayan dan penurunan stok ikan.

Solusi

- 1) Mengurangi kemiskinan nelayan diperlukan program *small skill* yang tepat sasaran dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian bagi masyarakat, sesuai dengan karakteristik dan budaya serta potensi daerah. Perlunya pelaksanaan regulasi pemerintah dan berkaitan pengawasan perairan di Provinsi Riau khususnya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga dapat menjadi instrument dalam rangka mengurangi beban pencemaran di perairan dengan melibatkan *stake holders* yaitu pihak industri sekitar perairan, masyarakat pengawas. Pembuatan skema bantuan bagi nelayan kecil untuk mendapatkan sarana kapal dan alat tangkap dengan sistem bantuan hibah.

-
- 2) Mencari alternatif pakan lokal yang bisa dan mudah didapat serta berkelanjutan, sehingga bisa menekan biaya produksi, seperti dedak padi, ampas sagu dan ikan rucah (tangkapan ikan sampingan);
 - 3) Melakukan diversifikasi turunan hasil perikanan sesuai dengan permintaan pasar dengan mengedepankan kualitas produk, dan kemasan yang sesuai keinginan pasar.

Melakukan patroli rutin terpadu antara pengawas perikanan, Satpol Air dalam rangka monitoring nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan yang melanggar peraturan yang berlaku, dan juga melaksanakan sosialisasi peraturan di bidang perikanan.

3.3. Analisis Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data, selanjutnya dilakukan evaluasi. Hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Berdasarkan Lampiran VII Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang : pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian / realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 dengan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, target, realisasi dan persentase disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Kategori Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Penilaian
1	Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	Jumlah Produksi Perikanan dan Kelautan (Ton)	246.023,23	348.704,30	141,74	Sangat Tinggi
		NTN (Nilai Tukar Nelayan)	103,34	120,95	117,04	Sangat Tinggi
		NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	104,05	106,31	102,17	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	42,0	40,00 *	95,24	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$)	8.500.000	4.310.900	47,90	Sangat Rendah
2	Menurunnya Tingkat Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing	Meningkatnya Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (Luas Kawasan) (Ha)	42	269.818,76	642.425,62	Sangat Tinggi
		Persentase Menurunnya IUU Fishing (%)	15	13,5	90	Tinggi

(*) Data statistik untuk RTP tahun 2017 tidak ada tercantum di aplikasi satudata.kkp.go.id

Berdasarkan tabel di atas dari 7 indikator yang diukur terdapat 5 indikator yang sangat tinggi. Capaian tertinggi dicapai oleh indikator meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah (luas kawasan) yang mencapai 642.425,62 % , dan yang terendah adalah meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan (US \$) yaitu 47,90 % . Dari realisasi perjanjian kinerja diatas maka dapat dijelaskan untuk setiap sasaran sebagai berikut :

SASARAN 1. MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Indikator yang digunakan yaitu : Jumlah produksi perikanan dan kelautan (ton), NTN (Nilai Tukar Nelayan), NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan),

Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun), Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$), Meningkatnya Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah/ Luas Kawasan (ha) dan Persentase Menurunnya IUU Fishing (%).

a. Jumlah Produksi Perikanan dan Kelautan (Ton)

Untuk jumlah produksi perikanan dan kelautan ini merupakan akumulasi dari produksi perikanan budidaya dan hasil tangkapan, dimana capaian jumlah produksi perikanan dan kelautan tahun 2017 sebesar 348.704,30 ton atau 141,74 % dari target sebesar 246.023,23 ton. Angka tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Capaian Jumlah Produksi Perikanan dan Kelautan (Ton) Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Jumlah produksi perikanan dan kelautan (ton)	246.023,23	348.704,30	141,74

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Pertumbuhan produksi perikanan budidaya untuk tahun 2017 terjadi kecenderungan positif yaitu melebihi dari yang ditargetkan. Komoditas ikan air tawar mendominasi produksi perikanan budidaya dibandingkan komoditas ikan laut. Jenis ikan air tawar yang tingkat pertumbuhannya tinggi adalah: Ikan Lele, Nila, Gurami dan Patin. Untuk capaian jumlah produksi perikanan dan kelautan tahun 2017 ini dibagi 2 (Dua) yaitu :

1. Perikanan Budidaya

Untuk jenis usaha Perikanan di Kolam mengalami kenaikan karena adanya perluasan lahan/kolam di kab/kota di Provinsi Riau. Sedangkan untuk jenis usaha Perikanan di tambak mengalami penurunan produksi di tahun 2016 karena untuk usaha budidaya di tambak memerlukan modal usaha yang cukup besar dan sumberdaya manusia yang bekerja di tambak juga harus yang cukup terampil, karena budidaya tambak lebih sedikit modern dibanding budidaya di kolam. Dan tidak sedikit orang yang berusaha di tambak mengalami kegagalan karena kurangnya penguasaan teknologi. Kemudian pada tahun 2017 usaha budidaya tambak mengalami kenaikan karena pada tahun tersebut harga

udang terutama udang vannamei cukup tinggi, sehingga banyak pembudidaya udang mengaktifkan kembali tambak – tambak yang ideal.

Untuk jumlah produksi perikanan budidaya, capaian jumlah produksi Tahun 2017 sebesar 214.016,5 Ton atau 191,49 % dari target sebesar 111.762,02 Ton. Angka tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton)	111.762,02	214.016,5	191,49

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Budidaya :

1. Peningkatan penyediaan pakan murah dan terjangkau serta berkualitas (pakan mandiri) sesuai dengan jenis komoditas yang dikembangkan dan bahan baku lokal yang tersedia di sekitarnya.
2. Pemenuhan kebutuhan induk dan benih bermutu secara mandiri.
3. Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan sehingga menjadi kelompok yang mandiri.
4. Pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) dengan mengintegrasikan rantai produksi dari hulu sampai hilir untuk efisiensi produksi.
5. Mendorong tumbuhnya industri penghasil sarana/peralatan/mesin perikanan budidaya di dalam daerah sesuai standar.
6. Penguatan akses permodalan usaha pembudidaya ikan skala kecil serta peningkatan minat investasi pembudidaya skala besar.
7. Pengembangan perikanan budidaya secara intensif dan berkelanjutan.
8. Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
9. Peningkatan daya saing produk perikanan budidaya melalui sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sehingga proses budidaya dapat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi.
10. Penerapan teknologi anjuran.
11. Perluasan lahan usaha budidaya perikanan.

-
12. Revitalisasi lahan marjinal dan ekstensifikasi.
 13. Pengembangan sarana produksi inovatif (vaksin).
 14. Peningkatan kapasitas prasarana (infrastruktur) perikanan budidaya yang efisien dan modern.
 15. Pengembangan komoditas unggulan.
 16. Penerapan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukung.
 17. *Backyard Aquaculture* (budidaya di pekarangan) dan pemanfaatan lahan marginal.
 18. Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan species ikan tahan perubahan lingkungan.
 19. Pengembangan minapadi komoditas ekonomis.
 20. Penerapan bisnis akuakultur berbasis blue ekonomi.
 21. Rehabilitasi lingkungan sentra produksi perikanan budidaya (lingkungan tambak).

2. Perikanan Tangkap

a. Perairan Laut

Penurunan produksi tangkap terjadi di 3 kabupaten/kota yaitu Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan. Hal ini akibat dari pelarangan pengoperasian alat tangkap yang termasuk kedalam kategori alat tangkap yang dilarang.

b. Perairan Umum

Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pendataan produksi perairan umum Ditahun 2016 bertambah menjadi 10 dari 9 Kabupaten/kota di tahun 2015. Kabupaten Bengkalis telah memulai pelaksanaan pendataan produksi perairan umum untuk pendataan Tahun 2016 sehingga penambahan jumlah produksi perairan umum Kabupaten Bengkalis ikut mempengaruhi kenaikan produksi

Indikator jumlah produksi perikanan tangkap merupakan perhitungan gabungan dari produksi yang didaratkan nelayan perikanan dan hasil estimasi yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan

tangkap. Untuk jumlah produksi perikanan budidaya, capaian jumlah produksi tahun 2017 sebesar 134.687,80 ton atau 100,32 % dari target sebesar 134.261,00 ton. Angka tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017

IKU	Target (ton)	Realisasi	(%)
Jumlah Produksi Hasil Tangkapan (Ton)	134.261,00	134.687,80	100,32

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Penangkapan :

1. Melakukan restocking benih Ikan Baung sebanyak 285.000 ekor di 5 lokasi perairan umum daratan (reservat) yang terindikasi mengalami penurunan ikan baung yang teridikasi mengalami penurunan sumberdaya ikan.
2. Penerbitan Izin Usaha Penangkapan ikan sebanyak 215 izin

b. NTN (Nilai Tukar Nelayan)

Untuk capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2017 yaitu sebesar 120,95 atau 117,04 % dari target sebesar 103,34. Angka tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. NTN (Nilai Tukar Nelayan) Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	NTN (Nilai Tukar Nelayan)	103,34	120,95	117,04

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

c. NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)

Untuk capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) pada tahun 2017 yaitu sebesar 106,31 atau 102,17 % dari target sebesar 104,05. Angka tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan) Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	104,05	106,31	102,17

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

d. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Untuk capaian angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) tahun 2017 yaitu sebesar 40 kg/kapita/tahun atau 95,24 % dari target sebesar 42 kg/kapita/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Angka Konsumsi Ikan Provinsi Riau Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	42	40 *	95,24

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

(*) Data statistik untuk RTP tahun 2017 tidak ada tercantum di aplikasi satudata.kkp.go.id

Tabel 3.10. Perbandingan Angka Konsumsi Ikan per Kapita Per Tahun 2017 se-Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/Kapita/Tahun)
1	Kuantan Singingi	317.935	38,13
2	Indragiri Hulu	417.733	38,01
3	Indragiri Hilir	713.034	38,81
4	Pelalawan	417.498	40,84
5	Siak	453.052	38,36
6	Kampar	812.702	39,44
7	Rokan Hulu	616.466	36,30
8	Bengkalis	551.683	38,64
9	Rokan Hilir	662.242	33,98
10	Kepulauan Meranti	182.152	58,11
11	Pekanbaru	1.064.566	33,94
12	Dumai	291.908	32,00
Total		6.500.971,00	40,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kemampuan produksi ikan 219.406,20 ton di Provinsi Riau Tahun 2016 dibandingkan kebutuhan konsumsi penduduk 260.039 ton maka Provinsi Riau masih kekurangan atau devisit sebesar -40.632,64 ton (18,51%) dari kebutuhan, dan kemudian apabila dilihat dari produksi ikan per kabupaten/kota dimana beberapa kabupaten/kota sebahagian telah melebihi kebutuhan antara lain Kabupaten Indragir Hilir, Kampar, dan Rokan Hilir. Permasalahannya yaitu tidak terpenuhinya kemampuan produksi bila dibandingkan dengan kebutuhan hal ini disebabkan antara lain yaitu laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada kemampuan pertumbuhan produksi ikan.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Konsumsi Ikan :

1. Melakukan sosialisasi tentang manfaat makan ikan kepada masyarakat
2. melakukan pelaku usaha meningkatkan kualitas produk perikanan
3. Mendorong inovasi dan nilai tambah produk
4. Melakukan sosialisasi produk olahan perikanan

e. Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$)

Untuk Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$) pada tahun 2017 yaitu sebesar 4.310.900 US \$ atau 47,90 % dari target sebesar 8.500.000 US \$. Angka tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$) Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$)	8.500.000	4.310.900	47,90

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

SASARAN 2. MENURUNNYA TINGKAT ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING

Indikator yang digunakan yaitu: Meningkatnya Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (Luas Kawasan) (Ha) dan Persentase Menurunnya IUU Fishing (%).

a. Meningkatnya Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah/ Luas Kawasan (ha)

Indikator ini dihitung dari capaian luas kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya

ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pada tahun 2017 target luasan kawasan konservasi perairan daerah sebesar 42 Ha, sementara capaiannya adalah sebesar 269,919,76 HA

Tabel 3.12. Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Tahun 2017 di Provinsi Riau

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya luas kawasan konservasi perairan daerah (Ha)	42	269.919,76	642.425,62

Sumber : Bidang Kelautan dan Pengawasan

b. Menurunnya Tingkat Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing

Total Kawasan Konservasi Perairan yang harus dilindungi 30% dari Total Luas Perairan Teritorial. Oleh Karena itu masih perlu adanya kajian dan identifikasi dari Kawasan Konservasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kawasan Konservasi Perairan pada tahun 2014, 2015, dan 2016 Kab Bengkalis merupakan kawasan konservasi suaka Terubuk yang SK penetapannya pada tahun 2012. Tahun 2015 Kabupaten Indragiri Hilir menginisiasasi Kawasan Konservasi Perairan dan pada tahun 2017 dikeluarkan SK Pencadangan dengan nama Taman Pulau Kecil Pantai Solop. Pada tahun 2016 ada penambahan kawasan konservasi di Kabupaten Rokan Hilir yaitu Suaka Pulau Kecil Kepulauan Aruah dan SK Penetapan Kawasan Konservasi dilaksanakan pada tahun 2017.

Untuk mendukung penambahan Kawasan Konservasi maka akan diadakan kegiatan pelaksanaan kearifan lokal (konservasi ikan terubuk) dan Kajian dan Identifikasi tentang kawasan konservasi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan dan peraturan menteri kelautan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Kosnervasi Perairan. Penambahan atau pengurangan kawasan kosnervasi terjadi karena adanya penghitungan ulang terhadap titik kordinat pada kawasan tersebut. Untuk jumlah menurunnya tingkat IUU Fishing, persentase menurunnya IUU Fishing tahun 2017 sebesar 13,5 % atau 90 % dari target sebesar 15 %. Angka tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Persentase Menurunnya IUU Fishing (%) Provinsi Riau Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase Menurunnya IUU Fishing (%)	15	13,5	90

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Menurunnya Tingkat Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing :

1. Patroli dikawasan perairan kab/kota
2. Penambahan PPNS dengan Bimtek
3. Melakukan Identifikasi Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)
4. Melakukan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove Dengan Penanaman Manrove sebanyak 14.000 batang

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun Sebelumnya

Membandingkan realisasi saat ini dengan realisasi tahun sebelumnya bertujuan untuk melihat capaian pertumbuhan dari indikator kinerja yang ada.

Tabel 3.14. Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2016 dan 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Growth (%)
1	Jumlah produksi perikanan dan kelautan (ton)	219.762,18	348.704,30	58,67
2	NTN (Nilai Tukar Nelayan)	116.47	120,95	3,85
3	NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	101.45	106,31	4,79
4	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	40	40 *	-
5	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$)	16.815.405	4.310.000,00	(74,37)
6	Meningkatnya Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah/ Luas Kawasan (ha)	23.491,32	269.919,76	1.049,02
7	Persentase Menurunnya IUU Fishing (%)		13,5	100,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 3.15. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Tingkat Capaian (%)
1	Jumlah produksi perikanan dan kelautan (ton)	246.023,23	348.704,30	141,74
2	NTN (Nilai Tukar Nelayan)	103,34	120,95	117,04
3	NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	104,05	106,31	102,17
4	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	42	40 *	95,24
5	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$)	8.500.000,00	4.310.000,00	47,90
6	Meningkatnya Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah/ Luas Kawasan (ha)	42	269.919,76	642.425,62
7	Persentase Menurunnya IUU Fishing (%)	15	13,5	90

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Keterangan:

(*) Data statistik untuk RTP tahun 2017 tidak ada tercantum di aplikasi satudata.kkp.go.id

(**) Berdasarkan data satu data.kkp.go.id untuk penangkapan laut

Berdasarkan Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 dengan Tahun 2017 dengan 7 (tujuh) indikator utama yaitu Jumlah produksi perikanan dan kelautan (ton) tingkat capaian 141,74 %, NTN (Nilai Tukar Nelayan) dengan capaian 117,04 %. NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan) 102,17 %. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) dengan capaian 95,24 %. Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$) capaian 47,90. Meningkatnya Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah/ Luas Kawasan (ha) capaiannya 642.425,62. Dan Persentase Menurunnya IUU Fishing 90 %. Dari data tersebut 3 (tiga) indikator utama yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dan 4 (empat) indikator yang melebihi target sasaran di tahun 2017 ini.

Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2017 dengan Target Akhir Periode IKU (Tahun 2018)

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2017 terhadap target akhir 2018
1	Jumlah produksi perikanan dan kelautan (ton)	348.704,30	348.704,30	121,56
2	NTN (Nilai Tukar Nelayan)	120,95	120,95	114,10
3	NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	106,31	106,31	2.449,77
4	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	40 *	40 *	2.281,19
5	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$)	4.310.000,00	4.310.000,00	47,90
6	Meningkatnya Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah/ Luas Kawasan (ha)	269.919,76	269.919,76	490.579,56
7	Persentase Menurunnya IUU Fishing (%)	13,5	13,5	54,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian kinerja, maka tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17. Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Sasaran (%)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan dan dan Kelautan	Jumlah produksi perikanan dan kelautan (ton)	141,74
		NTN (Nilai Tukar Nelayan)	117,04
		NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	102,17
		Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	95,24
		Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$)	47,90

2	Menurunnya Tingkat Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing	Meningkatnya Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah/ Luas Kawasan (ha)	642.425,62
		Persentase Menurunnya IUU Fishing (%)	90

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2017, untuk melaksanakan 12 program dan 67 kegiatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mendapat alokasi anggaran murni sebesar Rp 65.245.718.544,- dan pada APBD-P berubah menjadi Rp. 47.539.603.887,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Riau. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2017 terealisasi sebesar Rp 41.155.612.056,- (86,57 %). Dengan realisasi fisik 93,23 %. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya beberapa efisiensi penggunaannya seperti di perjalanan dinas, makan minum rapat/kegiatan, dan sebagainya. Adapun rincian dana tersebut diuraikan dibawah ini.

Tabel 3.18. Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.654.729.144,-	16.059.102.662,-	81,71
	BELANJA LANGSUNG	27.884.874.743,-	24.562.302.017,-	88,08
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.017.089.468,-	2.661.796.819,-	85,67
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.985.349.875,-	2.773.671.499,-	92,91
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	188.537.000,-	87.008.500,-	89,41
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	500.000.000,-	282.010.300,-	56,40
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	833.318.000,-	654.098.600,-	78,49
6	Perencanaan Tata Ruang	285.967.000,-	152.517.600,-	53,33
7	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	672.485.000,-	565.741.472,-	84,13
8	Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam	2.981.497.000,-	2.640.341.500,-	88,56

	Pendayagunaan Sumberdaya Laut			
9	Pengembangan Budidaya Perikanan	8.324.411.400,-	7.446.827.067,-	89,46
10	Pengembangan Perikanan Tangkap	2.713.530.000,-	2.415.214.350,-	89,01
11	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	2.713.530.000,-	2.415.214.350,-	93,34
12	Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan	2.354.640.000,-	2.140.556.650,-	90,91
TOTAL BELANJA		47.539.603.887,-	41.155.612.056,-	86,57

Pencapaian target keuangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator keberhasilan yaitu administrasi surat menyurat dan dokumen terlaksana dengan baik. Total anggaran yang tersedia sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 20.850.000,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 63,18 % dan realisasi fisik sebesar 73,18 %.

- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator keberhasilan yaitu tersedianya telepon, air dan listrik. Total anggaran yang tersedia sebesar Rp 819.839.468,- (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 625.537.508,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah) atau 76,30 % dan realisasi fisik sebesar 86,30 %.

- **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan indikator keberhasilan yaitu terpenuhinya kebersihan gedung kantor. Total anggaran yang tersedia sebesar Rp 259.800.000,- (Dua Ratus Lima

Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 230.530.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) atau 88,73 % dan realisasi fisik sebesar 98,73 %.

– **Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan indikator keberhasilan yaitu administrasi surat menyurat terlaksana dengan lancar dan maksimal. Total anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp 107.800.000,- (Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 94.967.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 88,10 % dan realisasi fisik sebesar Rp 98,00 %.

– **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator keberhasilan yaitu penyediaan barang cetak dan penggandaan dinas. Total anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 107.510.000,- (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau 74,14 % dan realisasi fisik sebesar 82,28 %.

– **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor**

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator keberhasilan yaitu penerangan bangunan kantor dan penyediaan komponen instalasi listrik. Total anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp 55.500.000,- (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 55.350.000,- (Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 99,73 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan indikator keberhasilan yaitu peralatan dan perlengkapan kantor tersedia. Total anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp 554.055.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 524.625.700,- (Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau 94,69 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator keberhasilan yaitu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Total anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp 44.495.000,- (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 21.120.000,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 47,47 % dan realisasi fisik sebesar 53,94 %.

- **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah**

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan indikator keberhasilan yaitu penunjang aktivitas berpikir pegawai. Total anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 529.040.611,- (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) atau sebesar 96,19 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

- **Penyediaan Makanan dan Minuman**

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan indikator keberhasilan yaitu penyediaan makan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan. Total anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah

sebesar Rp 59.800.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau 79,73 % dan realisasi fisik sebesar 89,73 %

- **Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD**

Kegiatan Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD dengan indikator keberhasilan yaitu terlaksananya dan meningkatnya penyampaian informasi dan publikasi kelautan dan perikanan. Total anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp 283.800.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 225.216.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) atau 79,36 % dan realisasi fisik sebesar 89,36 %.

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- **Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur**

Kegiatan Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur dengan indikator keberhasilan yaitu pembinaan olahraga dan agama bagi pegawai. Total anggaran yang tersedia sebesar Rp 97.317.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 87.008.500,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 89,41 % dan realisasi fisik sebesar 98 %.

- **Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu**

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan indikator keberhasilan yaitu tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu. Total anggaran yang tersedia sebesar Rp 91.220.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Rupiah). Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- **Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun**

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan indikator keberhasilan yaitu tersedianya laporan keuangan Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Total anggaran yang tersedia sebesar Rp 178.100.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 169.675.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 95,27 % dan realisasi fisik sebesar 98 %.

– **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan indikator keberhasilan yaitu terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Total anggaran yang tersedia sebesar Rp 121.000.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 87.342.800,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 72,18 % dan realisasi fisik sebesar 79,82 %.

– **Supervisi dan Statistik**

Kegiatan Supervisi dan Statistik dengan indikator keberhasilan yaitu tersedianya data dan informasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Total anggaran yang tersedia sebesar Rp 247.900.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 167.015.400,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Belas Ribu Rupiah) atau 67,37 % dan realisasi fisik sebesar 87,37 %.

– **Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator keberhasilan yaitu tersedianya laporan capaian kinerja SKPD. Total anggaran yang tersedia sebesar Rp 39.600.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar 17.047.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 43,05 % dan realisasi fisik sebesar 53 %

- **Rapat Koordinasi pada Setiap SKPD**

Kegiatan Rapat Koordinasi pada Setiap SKPD dengan indikator keberhasilan yaitu terlaksananya koordinasi pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Kabupaten/ Kota. Total anggaran yang tersedia sebesar Rp 198.948.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 176.858.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau 88,90 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- **Pendidikan dan Pelatihan Formal**

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan indikator keberhasilan yaitu terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur. Total anggaran yang tersedia sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 282.010.300,- (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sepuluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau 56,40 % dan realisasi fisik sebesar 66,40 %.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- **Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan indikator keberhasilan yaitu pengadaan dan perlengkapan kantor tersedia. Total anggaran yang tersedia sebesar Rp 257.650.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 255.741.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) atau 99,26 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

- **Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor**

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dengan indikator keberhasilan yaitu terpeliharanya dan terawatnya gedung kantor dan mushalla. Total anggaran yang tersedia sebesar Rp 669.360.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu

Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 622.781.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) atau 93,04 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

– **Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional**

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan indikator keberhasilan yaitu terjaganya dan terawatnya kendaraan dinas. Total anggaran yang tersedia sebesar Rp 124.800.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 79.350.499,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau 63,58 % dan realisasi fisik sebesar 73,58 %.

– **Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor**

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan indikator keberhasilan yaitu terpeliharanya dan terawatnya perlengkapan gedung kantor dan mushalla. Total anggaran sebesar Rp 100.700.000,- (Seratus Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 82.650.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 82,08 % dan realisasi fisik sebesar 92,08 %.

– **Pengadaan Meubeleur**

Kegiatan Pengadaan Meubeleur dengan indikator keberhasilan yaitu tersedianya meubeleur Politeknik Perikanan Dumai. Total anggaran sebesar Rp 1.832.839.875,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 1.733.149.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau 94,56 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

6. Program Perencanaan Tata Ruang

- **Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator keberhasilan yaitu terlaksananya Rancangan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Total anggaran sebesar Rp 285.967.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 152.517.600,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Rupiah) atau 53,33 % dan realisasi fisik sebesar 75 %.

7. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

- **Pembinaan dan Pemberdayaan serta Penilaian Pokmaswas**

Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan serta Penilaian Pokmaswas dengan indikator keberhasilan yaitu peningkatan kegiatan Pokmaswas serta bertambahnya pokmaswas yang aktif dalam membantu pengawasan SDKP. Total anggaran sebesar Rp 328.148.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 254.469.000,- (Dua Ratus Lima Puluh empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau 77,55 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

- **Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu**

Kegiatan Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu dengan indikator keberhasilan yaitu peningkatan pengawasan dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan. Total anggaran sebesar Rp 763.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 604.158.500,-,- (Enam Ratus Empat Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 79,18 % dan realisasi fisik sebesar 95,89 %.

- **Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas**

Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas dengan indikator keberhasilan yaitu terawatnya jumlah sarana dan prasarana kapal pengawas sehingga dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. Total anggaran sebesar Rp 379.082.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 365.341.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh satu Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 96,38 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

- **Pembangunan Pos Pengawas**

Kegiatan Pembangunan Pos Pengawas dengan indikator keberhasilan yaitu peningkatan pengawasan dan pengembangan SDKP. Total anggaran sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 193.595.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 96,80 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

- **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK)**

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK) dengan indikator keberhasilan yaitu tersedianya sarana/ prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK). Total anggaran sebesar Rp 1.311.267.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 1.222.777.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 93,25 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

– Penyusunan Pecadangan Kawasan Konservasi

Kegiatan Penyusunan Pecadangan Kawasan Konservasi dengan indikator keberhasilan yaitu luas kawasan konservasi daerah yang dibina. Total anggaran sebesar Rp 284.355.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 210.677.900,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 74,09 % dan realisasi fisik sebesar 97 %.

– Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove

Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove dengan indikator keberhasilan yaitu luas kawasan konservasi daerah yang dibina. Total anggaran sebesar Rp 388.130.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 355.063.572,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau 91,48 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

9. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

– Pengelolaan Perizinan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau

Kegiatan Pengelolaan Perizinan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau dengan indikator keberhasilan jumlah pembudidaya yang mengurus surat izin/ keterangan perikanan. Total anggaran sebesar Rp 368.270.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Dan dana yang teralisasi sebesar Rp 276.472.800,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 75,07 % dan realisasi fisik sebesar 78 %.

– Kegiatan Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya

Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya dengan indikator keberhasilan jumlah pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (CBIB). Total anggaran sebesar Rp 427.470.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 420.071.400,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 98,27 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

– **Pembinaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan**

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan dengan indikator keberhasilan jumlah pembudidaya yang dapat mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan. Total anggaran sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 418.418.500,- (Empat Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 83,68 % dan realisasi fisik sebesar 93,68 %.

– **Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan**

Kegiatan monitoring dan evaluasi budidaya perikanan dengan indikator keberhasilan jumlah pokdakan yang memanfaatkan prasarana dan sarana budidaya. Total anggaran sebesar Rp 242.130.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 237.318.200,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 98,01 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

– **Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima Bantuan PUMP PB**

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima Bantuan PUMP PB dengan indikator keberhasilan jumlah pembudidaya penerima PUMP PB yang terverifikasi. Total anggaran sebesar Rp 230.254.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 229.477.459,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau 99,66 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

- **Pengembangan Bibit Ikan Unggul**

Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul dengan indikator keberhasilan jumlah calon induk ikan unggul. Total anggaran sebesar Rp 196.610.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 129.005.895,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau 65,62 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

- **Pembenihan Ikan Langka/ Lokal Yang Mempunyai Nilai Ekonomis Tinggi**

Kegiatan Pembenihan Ikan Langka/ Lokal Yang Mempunyai Nilai Ekonomis Tinggi dengan indikator keberhasilan ditemukannya teknologi pembenihan ikan langka/ lokal yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Total anggaran sebesar Rp 1.496.969.400,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 1.406.094.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Enam Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 93,93 % dan realisasi fisik sebesar 98 %.

- **Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan**

Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan dengan indikator keberhasilan jumlah pembenih ikan yang dibina dan bersertifikat. Total anggaran sebesar Rp 291.450.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat ratus Lima Puluh Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 247.265.100,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) atau 84,84 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

- **Peningkatan Sistem dan Cara Pengelolaan Laboratorium UPT Pembenihan**

Kegiatan Peningkatan Sistem dan Cara Pengelolaan Laboratorium UPT Pembenihan dengan indikator keberhasilan jumlah petugas laboratorium yang terampil. Total anggaran sebesar Rp 170.000.000,- (Seratus Tujuh

Puluh Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 167.063.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau 98,27 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

– **Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan**

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan dengan indikator keberhasilan jumlah sarana dan prasarana dalam menunjang beroperasinya UPT Pembenihan. Total anggaran sebesar Rp 501.258.000,- (Lima Ratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 469.675.550,- (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 93,70 % dan realisasi fisik sebesar 98 %.

– **Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan Kinerja UPTD se Provinsi Riau**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan Kinerja UPTD se Provinsi Riau dengan indikator keberhasilan jumlah peserta bimtek untuk mendukung pelayanan dan kinerja UPTD Pembenihan Provinsi Riau. Total anggaran sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 352.673.800,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 88,17 % dan realisasi fisik sebesar

– **Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pembenihan**

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pembenihan dengan indikator keberhasilan jumlah pelayanan UPT Pembenihan dalam menunjang produksi benih. Total anggaran sebesar Rp 1.450.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 1.336.002.750,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 92,14 % dan realisasi fisik sebesar

- **Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan (DAK)**

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan (DAK) dengan indikator keberhasilan jumlah sarana dan prasarana dalam menunjang beroperasinya UPT Pembenihan. Total anggaran sebesar Rp 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 1.588.976.208,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah) atau 83,63 % dan realisasi fisik sebesar 97 %.

- **Revitalisasi Kawasan Budidaya Air Laut, Payau dan Tawar**

Kegiatan Revitalisasi Kawasan Budidaya Air Laut, Payau dan Tawar dengan indikator keberhasilan jumlah luas kawasan perikanan budidaya yang direvitalisasi. Kegiatan tidak jadi dilaksanakan karena dana di drop setelah APBD Perubahan 2017.

- **Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya**

Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya dengan indikator keberhasilan jumlah prasarana dan sarana yang memadai, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi. Kegiatan tidak jadi dilaksanakan karena dana di drop setelah APBD Perubahan 2017.

- **Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Hibah Tahun 2018**

Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Hibah Tahun 2018 dengan indikator keberhasilan jumlah kelompok yang teridentifikasi dan terverifikasi calon penerima hibah tahun 2018. Total anggaran sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 120.042.500,- (Seratus Dua Puluh Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 80,03 % dan realisasi fisik sebesar

10. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- Pembinaan dan Operasional Forum KUB Perikanan Tangkap

Kegiatan Pembinaan dan Operasional Forum KUB Perikanan Tangkap dengan indikator keberhasilan jumlah nelayan yang dibina dalam forum KUB perikanan tangkap. Total anggaran sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 174.230.800,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 87,12 % dan realisasi fisik sebesar 97,12 %

- **Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodalan Perikanan Tangkap**

Kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodalan Perikanan Tangkap dengan indikator keberhasilan jumlah nelayan yang melakukan pengembangan usaha perikanan tangkap melalui investasi permodalan. Total anggaran sebesar Rp 463.290.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 397.184.200,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 85,73 % dan realisasi fisik sebesar 95,73 %.

- **Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum**

Kegiatan Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum dengan indikator keberhasilan jumlah pengkayaan stock (restocking) sumberdaya ikan yang terancam punah di perairan umum daratan. Total anggaran sebesar Rp 906.975.000,- (Sembilan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 811.954.200,- (Delapan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 89,52 % dan realisasi fisik sebesar 97,52 %.

– **Pengelolaan Perairan Teritorial di WPP**

Kegiatan Pengelolaan Perairan Teritorial di WPP dengan indikator keberhasilan jumlah nelayan yang terlibat dalam pengelolaan perairan teritorial. Total anggaran sebesar Rp 294.850.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 239.310.450,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 81,16 % dan realisasi fisik sebesar 91,16 %.

– **Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau**

Kegiatan Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau dengan indikator keberhasilan jumlah perizinan perikanan tangkap yang diterbitkan. Total anggaran sebesar Rp 474.820.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Dan dana yang teralisasi sebesar Rp 418.939.700,- (Empat Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau 88,23 % dan realisasi fisik sebesar 98,23 %.

– **Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak dengan indikator keberhasilan dokumen operasional pelabuhan perikanan. Total anggaran sebesar Rp 373.595.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 373.595.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 100 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

11. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

– Pengembangan Nilai Produk Pengolahan Hasil Perikanan

Kegiatan Pengembangan Nilai Produk Pengolahan Hasil Perikanan dengan indikator keberhasilan jumlah pengolah hasil perikanan yang terampil. Total anggaran sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 297.953.700,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau 85,13 % dan realisasi fisik sebesar 95 %.

– Lomba dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM Terbaik se- Provinsi Riau

Kegiatan Lomba dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM Terbaik se- Provinsi Riau dengan indikator keberhasilan jumlah UPI dan UMKM yang memenuhi persyaratan lomba/ penilaian terbaik. Total anggaran sebesar Rp 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 260.606.800,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 96,52 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

– Pendampingan Usaha UMKM Pengolahan Hasil Perikanan dengan Pengusaha Pemasaran

Kegiatan Pendampingan Usaha UMKM Pengolahan Hasil Perikanan dengan Pengusaha Pemasaran dengan indikator keberhasilan jumlah kesepakatan kerjasama antara UMKM dengan pengusaha pemasaran. Total anggaran sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 186.199.500,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 93,10 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

– Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan

Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan dengan indikator keberhasilan

jumlah sertifikat yang diberikan bagi UMKM pengolahan hasil perikanan. Total anggaran sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 176.327.113,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah) atau 88,16 % dan realisasi fisik sebesar 98 %.

– **Pameran/ Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan**

Kegiatan Pameran/ Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan dengan indikator keberhasilan jumlah keikutsertaan dalam pameran/ bazar produksi pengolahan hasil perikanan. Total anggaran sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 477.089.400,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 95,42 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

– **Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan**

Kegiatan Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan dengan indikator keberhasilan jumlah inovasi menu serba ikan. Total anggaran sebesar Rp 725.330.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 665.568.200,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 91,76 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

– **Sosialisasi Gemarikan Melalui Media Elektronik dan Cetak**

Kegiatan Sosialisasi Gemarikan Melalui Media Elektronik dan Cetak dengan indikator keberhasilan jumlah sosialisasi Gemarikan. Total anggaran sebesar Rp 209.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 202.291.200,- (Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 96,79 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

– **Peningkatan Kapasitas dan Operasional LPPMHP Provinsi Riau**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Operasional LPPMHP Provinsi Riau dengan indikator keberhasilan dokumen operasional LPPMHP.

Total anggaran sebesar Rp 483.720.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 476.481.747,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau 98,50 % dan realisasi fisik sebesar 99.80 %.

12. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan

– Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan dengan indikator keberhasilan jumlah sarana dan prasarana produksi pelayanan kinerja UPT Pelatihan Perikanan. Total anggaran sebesar Rp 1.290.800.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 1.148.418.600,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Enam ratus Rupiah) atau 88,97 % dan realisasi fisik sebesar 91,31 %.

– Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan

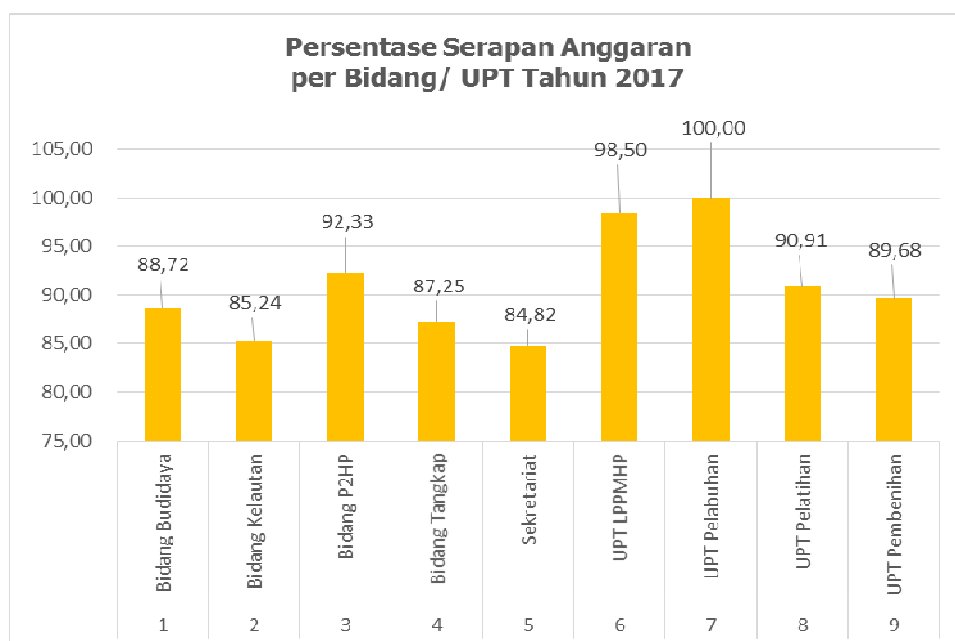
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan dengan indikator keberhasilan jumlah sarana dan prasarana UPT Pelatihan dalam mendukung operasional pelatihan. Total anggaran sebesar Rp 663.840.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 612.993.650,- (Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 92,34 % dan realisasi fisik sebesar 99,26 %.

– Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau

Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau dengan indikator keberhasilan jumlah petambak yang terlatih. Total anggaran sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah). Dan dana yang terealisasi sebesar Rp 379.144.400,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 94,79 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Tabel 3.19. Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Bidang/UPT Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017

No	Bidang/ UPT	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bidang Budidaya	1.918.124.000,-	1.701.800.859,-	88,72
2	Bidang Kelautan	3.939.949.000,-	3.358.600.572,-	85,24
3	Bidang P2HP	2.454.330.000,-	2.266.035.913,-	92,33
4	Bidang Tangkap	2.339.935.000,-	2.041.619.350,-	87,25
5	Sekretariat	7.614.294.343,-	6.458.585.718,-	84,82
6	UPT LPPMHP	483.720.000,-	476.481.747,-	98,50
7	UPT Pelabuhan	373.595.000,-	373.595.000,-	100
8	UPT Pelatihan	2.354.640.000,-	2.140.556.650,-	90,91
9	UPT Pembenihan	6.406.287.400,-	5.745.026.208,-	89,68



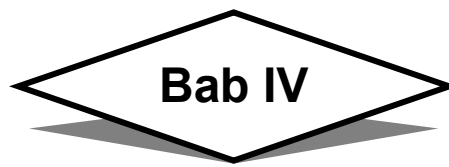
Gambar 3.2. Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Per Bidang/UPT Tahun 2017

Kinerja penyerapan anggaran sudah memenuhi rencana, di semua bidang/UPT kinerja keuangan berada di atas 80 %. Untuk serapan dana terendah di Sekretariat sebesar 84,82 % dan di Bidang Kelautan sebesar 85,24 %. Sementara untuk serapan dana tertinggi yaitu UPT pelabuhan sebesar 100 % dan UPT LPPMHP sebesar 98,50 %.

Apabila dibandingkan dengan serapan anggaran pada tahun 2016, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20. Perbandingan Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016-2017

Tahun	2016	2017
Pagu Anggaran (Rp.)	46.896.859.261,36	47.539.603.887,00
Realisasi Anggaran (Rp.)	38.281.276.900,00	41.155.612.056,00
(%) Serapan	81,63	86,57



PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan tidak hanya berperan sebagai alat kendali tetapi juga sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang digunakan serta untuk mengetahui tingkat capaian sasaran rencana kerja. LAKIP juga merupakan salah satu cara untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik, menunjukkan ekonomis, efektif, dan efisien uang publik dibelanjakan. Lebih jauh LAKIP dapat memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program kegiatan, pencapaian kegiatan, serta perumusan masalah dan rekomendasinya.

Laporan Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, memberikan gambaran capaian sasaran kinerja, masalah yang melatar belakangi capaian kinerja dan upaya untuk pemecahan masalah dalam rangka reorientasi dan reposisi tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau di Provinsi Riau dimasa mendatang.

Dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, masih banyak dijumpai hambatan dan kendala yang tentunya merupakan kewajiban seluruh pihak untuk secara proaktif melakukan penyempurnaan, baik metodologi, substansi maupun kedalaman analisis kinerja guna penyempurnaan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada publik.

DATA CAPAIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2017 terhadap target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan	Jumlah Produksi Perikanan dan Kelautan	219.762,18	246.023,23 Ton	348.704,30 ton	141,74	286.854,12 ton	121,56
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	90.378,08	111.762,02	214.016,5	191,49	130.000	164,63
	Meningkatnya Hasil Tangkapan (Ton)	129.384,1	134.261,00	134.687,80	100,32	140.000	96,21
	Meningkatnya usaha di bidang perikanan dan kelautan						
	1. Jumlah pelaku usaha perikanan (orang)						
	- Perikanan Tangkap (orang)	26.055	81.794	26.055 (*)	28,89	90.178	28,89
	- Perikanan Budidaya (RTP)	21.911	29.706	21.911 (*)	60,95	35.948	60,95

	- Unit Pengolahan Ikan (UPI)	371	388	388	100	410	94,63
	2. NTN dan NTPi (%)						
	- NTN	116.47	103,34	120,95	117,04	106	114,10
	- NTPi	101.45	104,05	106,31	102,17	104.9	2449,77
	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (KG/Kapita/Tahun)	40	42,0	40,00 *	95,24	42.5	2281,19
	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$)	16.815.405	8.500.000	4.310.900	47.90	9.000.000	47,90
Menurunnya Tingkat Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing	Persentase Menurunnya IUU Fishing		15%	13,5 %	90	25 %	54,00
	Peningkatan kesadaran hukum (Pelaku Usaha yang taat Hukum)	44	46	74	102.71	76	97.34
	Meningkatnya Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (Luas Kawasan)	23.491,32	42 Ha	269.818,76 Ha	642425,62	55 ha	490579,56
	Tidak Over fishing / ketersediaan ikan di perairan (Kepmen KP. No. 47 Tahun 2016)	102.100.9	1.627.755 ton	106.184,936(**)	6.52	1.627.755 ton	6.52

Keterangan:

(*) Data statistik untuk RTP tahun 2017 tidak ada tercantum di aplikasi satudata.kkp.go.id

(**) Berdasarkan data satu data.kkp.go.id untuk penangkapan laut

I. Narasi :**A. Capaian tahun 2017 :****1. PERIKANAN BUDIDAYA**

Untuk jenis usaha Perikanan di Kolam mengalami kenaikan karena adanya perluasan lahan/kolam di kab/kota di Provinsi Riau. Sedangkan untuk jenis usaha Perikanan di tambak mengalami penurunan produksi di tahun 2016 karena untuk usaha budidaya di tambak memerlukan modal usaha yang cukup besar dan sumberdaya manusia yang bekerja di tambak juga harus yang cukup terampil, karena budidaya tambak lebih sedikit modern dibanding budidaya di kolam. Dan tidak sedikit orang yang berusaha di tambak mengalami kegagalan karena kurangnya penguasaan teknologi. Kemudian pada tahun 2017 usaha budidaya tambak mengalami kenaikan karena pada tahun tersebut harga udang terutama udang vannamei cukup tinggi, sehingga banyak pembudidaya udang mengaktifkan kembali tambak – tambak yang ideal.

2. PERIKANAN TANGKAP**a. Perairan Laut**

Penurunan produksi tangkap terjadi di 3 kabupaten/kota yaitu Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan. Hal ini akibat dari pelarangan pengoperasian alat tangkap yang termasuk kedalam kategori alat tangkap yang dilarang.

b. Perairan Umum

Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pendataan produksi perairan umum Ditahun 2016 bertambah menjadi 10 dari 9 Kabupaten/kota di tahun 2015. Kabupaten Bengkalis telah memulai pelaksanaan pendataan produksi perairan umum untuk

pendataan Tahun 2016 sehingga penambahan jumlah produksi perairan umum Kabupaten Bengkalis ikut mempengaruhi kenaikan produksi

3. Angka Konsumsi Ikan

Kemampuan produksi ikan 219.406,20 ton di Provinsi Riau Tahun 2016 dibandingkan kebutuhan konsumsi penduduk 260.039 ton maka Provinsi Riau masih kekurangan atau devisit sebesar -40.632,64 ton (18,51%) dari kebutuhan, dan kemudian apabila dilihat dari produksi ikan per kabupaten/kota dimana beberapa kabupaten/kota sebahagian telah melebihi kebutuhan antara lain Kabupaten Indragir Hilir, Kampar, dan Rokan Hilir. Permasalahannya yaitu tidak terpenuhinya kemampuan produksi bila dibandingkan dengan kebutuhan hal ini disebabkan antara lain yaitu laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada kemampuan pertumbuhan produksi ikan.

4. Menurunnya Tingkat Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing

Total Kawasan Konservasi Perairan yang harus dilindungi 30% dari Total Luas Perairan Teritorial. Oleh Karena itu masih perlu adanya kajian dan identifikasi dari Kawasan Konservasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kawasan Konservasi Perairan pada tahun 2014, 2015, dan 2016 Kab Bengkalis merupakan kawasan konservasi suaka Terubuk yang SK penetapannya pada tahun 2012. Tahun 2015 Kabupaten Indragiri Hilir menginisiasasi Kaawasan Konservasi Perairan dan pada tahun 2017 dikeluarkan SK Pencadangan dengan nama Taman Pulau Kecil Pantai Solop. Pada tahun 2016 ada penambahan kawasan konservasi di Kabupaten Rokan Hilir yaitu Suaka Pulau Kecil Kepulauan Aruah dan SK Penetapan Kawasan Kosnervasi dilaksanakan pada tahun 2017.

Untuk penambahan Kawasan Konservasi maka diperlukan solusi dilaksanakan Kajian dan Identifikasi tentang kawasan konservasi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan dan peraturan menteri kelautan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Kosnervasi Perairan. Penambahan atau pengurangan kawasan kosnervasi terjadi karena adanya penghitungan ulang terhadap titik kordinat pada kawasan tersebut.

II. Perbandingan dengan tahun sebelumnya :

1. Bila dibandingkan capaian indikator kinerja tahun 2016 dengan tahun 2017 menunjukkan peningkatan capaian produksi perikanan dan kelautan. Akan tetapi terjadinya penurunan nilai ekspor karena data yang didapat baru per juli 2017 dari Dinas Perindustrian Provinsi Riau.

III. Capaian s/d 2017 terhadap target akhir RPJMD :

Bila dibandingkan dengan capaian indikator target akhir RPJMD, untuk produksi perikanan dan kelautan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dan melebihi target RPJMD pada tahun 2019. Hal ini disebabkan meningkatnya kemampuan pembudidaya bagaimana cara budidaya yang baik dan bantuan alat tangkap dan kapal nelayan, melalui pembinaan dan bantuan yang diberikan sehingga meningkatnya kesejahteraan pembudidaya dan nelayan.

Total Kawasan Konservasi Perairan yang harus dilindungi 30% dari Total Luas Perairan Teritorial. Oleh Karena itu masih perlu adanya kajian dan identifikasi dari Kawasan Konservasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kawasan Konservasi Perairan pada tahun 2014, 2015, dan 2016 Kab Bengkalis merupakan kawasan konservasi suaka Terubuk yang SK penetapannya pada tahun 2012. Tahun 2015 Kabupaten Indragiri Hilir menginisiasasi Kaawasan Konservasi Perairan dan pada tahun 2017 dikeluarkan SK Pencadangan dengan nama Taman Pulau Kecil Pantai Solop. Pada tahun 2016 ada penambahan kawasan konservasi di Kabupaten Rokan Hilir yaitu Suaka Pulau Kecil Kepulauan Aruah dan SK Penetapan Kawasan Konservasi dilaksanakan pada tahun 2017.

Untuk mendukung penambahan Kawasan Konservasi maka akan diadakan kegiatan pelaksanaan kearifan lokal (konservasi ikan terubuk) dan Kajian dan Identifikasi tentang kawasan konservasi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan dan peraturan menteri kelautan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Kosnervasi Perairan. Penambahan atau pengurangan kawasan kosnervasi terjadi karena adanya penghitungan ulang terhadap titik kordinat pada kawasan tersebut.

IV. Perbandingan dengan capaian Regional/Nasional :

- 1.
2. Untuk dapat mencapai target seharusnya kegiatan patroli pengawasan di wilayah perairan provinsi Riau harus terintegrasi dengan kegiatan dibidang tangkap dan pelabuhan

V. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target :

A. Budidaya

1. Peningkatan penyediaan pakan murah dan terjangkau serta berkualitas (pakan mandiri) sesuai dengan jenis komoditas yang dikembangkan dan bahan baku lokal yang tersedia di sekitarnya.
2. Pemenuhan kebutuhan induk dan benih bermutu secara mandiri.
3. Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan sehingga menjadi kelompok yang mandiri.
4. Pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) dengan mengintegrasikan rantai produksi dari hulu sampai hilir untuk efisiensi produksi.
5. Mendorong tumbuhnya industri penghasil sarana/peralatan/mesin perikanan budidaya di dalam daerah sesuai standar.
6. Penguatan akses permodalan usaha pembudidaya ikan skala kecil serta peningkatan minat investasi pembudidaya skala besar.
7. Pengembangan perikanan budidaya secara intensif dan berkelanjutan.
8. Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
9. Peningkatan daya saing produk perikanan budidaya melalui sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sehingga proses budidaya dapat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi.

10. Penerapan teknologi anjuran.
11. Perluasan lahan usaha budidaya perikanan.
12. Revitalisasi lahan marginal dan ekstensifikasi.
13. Pengembangan sarana produksi inovatif (vaksin).
14. Peningkatan kapasitas prasarana (infrastruktur) perikanan budidaya yang efisien dan modern.
15. Pengembangan komoditas unggulan.
16. Penerapan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukung.
17. *Backyard Aquaculture* (budidaya di pekarangan) dan pemanfaatan lahan marginal.
18. Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan species ikan tahan perubahan lingkungan.
19. Pengembangan minapadi komoditas ekonomis.
20. Penerapan bisnis akuakultur berbasis blue ekonomi.
21. Rehabilitasi lingkungan sentra produksi perikanan budidaya (lingkungan tambak).

B. Penangkapan:

1. Melakukan restocking benih Ikan Baung sebanyak 285.000 ekor di 5 lokasi perairan umum daratan (reservat) yang terindikasi mengalami penurunan ikan baung yang teridikasi mengalami penurunan sumberdaya ikan.
2. Penerbitan Izin Usaha Penangkapan ikan sebanyak 215 izin

c. Angka Konsumsi Ikan

1. Melakukan sosialisasi tentang manfaat makan ikan kepada masyarakat
2. melakukan pelaku usaha meningkatkan kualitas produk perikanan
3. Mendorong inovasi dan nilai tambah produk
4. Melakukan sosialisasi produk olahan perikanan

d. Menurunnya Tingkat Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing

1. Patroli dikawasan perairan kab/kota
2. Penambahan PPNS dengan Bimtek
3. Melakukan Identifikasi Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)
4. Melakukan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove Dengan Penanaman Manrove sebanyak 14.000 batang

VI. Kendala/hambatan dalam pencapaian target kinerja :

A. Budidaya

1. Penyediaan dan distribusi induk unggul dan benih berkualitas masih terbatas.
2. Harga pakan yang tinggi.
3. Terjadinya inflasi harga-harga kebutuhan bahan pokok yang menyebabkan harga bahan baku pakan ikan ikut melonjak dan berakibat pada semakin tingginya biaya produksi
4. Menurunnya kualitas lingkungan perairan sebagai akibat dari limbah budidaya maupun limbah lainnya.
5. Adanya serangan penyakit ikan yang seringkali mengancam usaha budidaya.
6. Pembudidaya tidak melaporkan jika ada penyakit yang menyerang ikan budidayanya.
7. Pembudidaya masih banyak menggunakan obat-obatan yang tidak terdaftar di KKP.
8. Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan budidaya, terutama terkait dengan kondisi saluran air, irigasi, jalan produksi, jaringan listrik dan lainnya.
9. Masih kurangnya kepercayaan dari pihak bank kepada pembudidaya karena belum semua pembudidaya dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank.
10. Sumber daya manusia pelaku usaha perikanan budidaya masih kurang pengetahuannya;

11. SDM yang kompeten di bidang perikanan budidaya masih kurang.
12. Tenaga auditor CBIB dan CPIB masih kurang.
13. Kesadaran pembudidaya dalam menerapkan prinsip-prinsip CPIB dan CBIB masih kurang.
14. Pembinaan dari kabupaten/kota Kurang efektif.
15. Sistem pendataan dan pelaporan yang belum optimal sehingga berakibat terjadinya keterlambatan penyampaian data dukung.
16. Beberapa Kabupaten/kota belum mampu mengembangkan kawasan perikanan yang terintegritas.

B. Tangkap

1. Belum adanya peta kawasan perairan umum daratan (reservat) yang terindikasi mengalami penurunan sumberdaya ikan.
2. Masih banyak kapal perikanan yang belum melakukan pengurusan izin usaha perikanan (data statistik Perikanan tangkap 2016 = jumlah armada penangkapan >5-30 GT pada tahun 2016 sebanyak 5.242 unit)
3. Jarak tempuh yang jauh dari sentra nelayan ke ibukota provinsi untuk pengurusan izin usaha perikanan tangkap.

C. Angka Konsumsi Ikan

1. Stigma negatif tentang ikan pada sebagian masyarakat (banyak makan ikan cacingan, makan ikan tidak bergengsi)
2. UMKM yang belum memenuhi standar
3. Minimnya pengetahuan pelaku usaha dan sarana pendukung dalam melakukan inovasi produk perikanan
4. Produk olahan yang belum memenuhi standar
5. Produk masih belum dikenal luas oleh masyarakat

d. Menurunnya Tingkat Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing

1. Kurangnya speed boat pengawasan yang hanya 1 unit keberadaan di Dumai.

2. Kurangnya SDM Pengawasan yang dimiliki oleh Provinsi yang tersedia sekarang PPNSnya ada 2 pengawas ada 2, Polsus tidak ada
3. Luasnya kawasan perairan laut dan perairan umum yang harus diawasi
4. Masih Banyak Kawasan yang akan dijadikan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah disebabkan belum ada inisiasi dari Stakeholder
5. Masih Banyak Kawasan Mangrove yang rusak dan perlu direhabilitasi dan terjadinya abrasi pantai.
6. Belum adanya data kawasan pantai yang mengalami abrasi

VII. Solusi strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan di tahun depan untuk mengatasi kendala/permasalahan:

A. Budidaya

1. Mengoptimalkan fungsi UPT dan UPTD serta unit pembenihan masyarakat.
2. Mengembangkan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) dengan mendorong kemandirian kelompok yang memproduksi pakan mandiri dan mengembangkan bahan baku pakan lokal serta penyediaan sarana produksi pakan.
3. Mengembangkan teknologi *biofloc* untuk menekan *Food Conversion Ratio/FCR* guna meningkatkan efisiensi pakan dan produktivitas perikanan budidaya
4. Melakukan pembinaan ke pembudidaya supaya dapat lebih mengoptimalkan hasil produksi dan terhindar dari HPI (hama dan penyakit ikan), dan pengujian sampel penyakit ikan.
5. Melakukan Pembinaan Pemantauan Obat Ikan yang lebih intensif ke pembudidaya.
6. Melakukan pelatihan dan magang bagi pembudidaya ikan dan petugas DKP.
7. Melakukan sertifikasi dan surveilen CPIB dan Apresiasi auditor CPIB;
8. Melakukan pelatihan untuk *recruitment* auditor untuk menambah jumlah auditor yang telah ada.
9. Temu lapang sebagai sarana untuk mentransfer teknologi.

10. Pengembangan berbagai skema pembiayaan kredit program agar dapat mempermudah akses pembudidaya ikan untuk mendapatkan modal usaha melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
11. Fasilitasi akses perbankan bagi pembudidaya ikan dan pendampingan akses pembiayaan usaha perikanan budidaya.
12. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan inventarisasi/identifikasi/ pendataan tenaga kerja perikanan budidaya yang lebih intensif.
13. Memberikan paket bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya bagi pembudidaya yang usahanya berkelanjutan.
14. Membuat data base perikanan budidaya yang aplikatif dan *online*.

B. Tangkap

1. Membuat profil kawasan perairan umum daratan dan mendata kawasan yang mengalami penurunan sumberdaya ikan
2. Melaksanakan Sosialisasi tentang Perizinan Perikanan Tangkap.
3. Melaksanakan gerai perizinan di sentra nelayan.

C. Angka Konsumsi Ikan

1. Melakukan sosialisasi gemarikan lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat
2. Melakukan pelatihan dan penilaian UMKM serta membantu mengurus perizinan
3. Melakukan demo atau pelatihan terhadap menu-menu baru produk hasil perikanan
4. Packaging yang belum memenuhi standar
5. Melakukan pelatihan dan peningkatan sarana dan prasarana packgiing produk olahan hasil perikanan
6. Meningkatkan jaring pemasaran melalui pameran dalam dan luar negeri

e. Menurunnya Tingkat Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing

1. Pembentukan UPT Pengawasan di 3 Wilayah kerja (Bengkalis, Rohil, dan Inhil)
2. Penambahan Speed Boat Pengawas sebagai dukungan dari UPT Pengawasan
3. sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tentang Pemindahan Personil PPNS Pengawas dan Polsus yang ada di Kab/Kota untuk jadi Pegawai Provinsi
4. Mengupayakan adanya inisiasi dan identifikasi kawasan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah
5. Melakukan Penanaman Mangrove pada tahun 2018 sebanyak 48.000 batang di kawasan mangrove yang rusak.
6. Membuat profile kawasan mangrove Riau dan mendata kawasan abrasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Program/Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan	Meningkatnya Hasil Tangkapan (ton)				
		8.324.411.400,00	6.717.642.255,00	1.606.769.145,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA
		427.470.000	420.071.400	7.398.600	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya

		230.254.000	229.477.459	776.541	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima Bantuan PUMP PB
		500.000.000	418.418.500	81.581.500	Pembinaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan
		242.130.000	237.318.200	4.811.800	Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan
		368.270.000	276.472.800	91.797.200	Pengelolaan Perizinan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau
		150.000.000	120.042.500	29.957.500	Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Hibah Tahun 2018
		2.713.530.000,00	2.371.434.850,00	342.095.150,00	Program Pengembangan Perikanan Tangkap

		200.000.000,00	174.230.800,00	25.769.200	Pembinaan Dan Operasional Forum Kub Perikanan Tangkap
		463.290.000,00	366.242.200,00	97.047.800	Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodalan Perikanan Tangkap
		906.975.000,00	811.679.200,00	95.295.800	Pemulihan Sumberdaya Ikan Di Perairan Umum
		294.850.000,00	230.184.450,00	64.665.550	Pengelolaan Perairan Teritorial Di Wpp
		474.820.000,00	415.503.200,00	59.316.800	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap Di Provinsi Riau
		373.595.000,00	373.595.000,00	-	Peningkatan Kapasitas Dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak
		2.938.050.000,00	2.742.572.350,00	195.477.650,00	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

		350.000.000,00	297.953.900,00	52.046.100	Pengembangan Nilai Produk Pengelohan Hasil Perikanan
		270.000.000,00	260.606.800,00	9.393.200	Lomba Dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan (upi) Dan Umkm Terbaik Se Provinsi Riau
		200.000.000,00	186.199.500,00	13.800.500	Pendampingan Usaha Umkm Pengolahan Hasil Perikanan Dengan Pengusaha Pemasaran
		200.000.000,00	176.326.913,00	23.673.087	Pembinaan Dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi Umkm Pengolahan Hasil Perikanan
		500.000.000,00	477.089.400,00	22.910.600	Pameran/bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan
		725.330.000,00	665.568.200,00	59.761.800	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan

		209.000.000,00	202.291.200,00	6.708.800	Sosialisasi Gemarikan Melalui Media Elektronik Dan Cetak
		483.720.000,00	476.536.437,00	7.183.563	Peningkatan Kapasitas Dan Operasional Lppmhp Prov Riau
		285.967.000,00	152.869.600,00	133.097.400,00	Program Perencanaan Tata Ruang
		285.967.000,00	152.869.600,00	133.097.400	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil
		2.981.497.000,00	2.691.506.500,00	289.990.500,00	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
		328.148.000,00	254.469.000,00	73.679.000	Pembinaan Dan Pemberdayaan Serta

					Penilaian Pokmaswas
		763.000.000,00	655.323.500,00	107.676.500	Gelar Operasi Dan Pengawasan Terpadu
		379.082.000,00	365.341.500,00	13.740.500	Peningkatan Operasional Dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
		200.000.000,00	193.595.000,00	6.405.000	Pembangunan Pos Pengawas
		1.311.267.000,00	1.222.777.500,00	88.489.500	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (dak)
		672.485.000,00	565.741.472,00	106.743.528,00	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
		284.355.000,00	210.677.900,00	73.677.100	Penyusunan Pecdangan Kawasan Konservasi
		388.130.000,00	355.063.572,00	33.066.428	Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove
	Total	20.270.580.400,00	17.257.368.677,00	3.013.211.723,00	

Narasi : Analisis efisiensi anggaran :

1. Adanya dana Sisa Mati Pagu.
2. Terdapat belanja modal pengadaan alat laboratorium yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya kenaikan dolar sehingga harga alat tersebut yang ada di APBDP tidak mencukupi untuk dilaksanakan serta Perdin Luar Daerah yang tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya.
3. Terdapat perjalanan dinas dalam dan luar daerah melalui APBDP yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan waktu dan dana yang tidak cukup, serta narasumber pusat yang tidak hadir.
4. Adanya honor tim POKJA dan FGD Rancangan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir yang tidak dilaksanakan karena keterlambatan keluarnya SK Gubernur.
5. Adanya sisa kontrak dari penawaran kontrak, sisa honorarium dan sisa belanja.
6. Kapal pengawasan mengalami kerusakan sehingga menyebabkan uang minyak dan uang layar tidak bisa digunakan.
7. Pembuatan video kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena tidak cukup anggarannya.
8. Juri lomba masak dari KKP kegiatan Lomba Masak Ikan tidak bisa hadir karena tidak dilaksanakannya kegiatan Lomba Masak oleh kab / kota.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatkan kesejahteraan pelaku perikanan dan kelautan yang mandiri	Nilai Tukar Petani (Nelayan)	103,35 (%)
		Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun	42,06 kg/th
2	Meningkatkan pengolahan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan	Produksi perikanan (ton)	246.023,02 (Ton)

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp. 2.888.050.000,00	APBD
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan	Rp. 4.190.800.000,00	APBD
3. Program pengembangan perikanan tangkap	Rp. 2.165.610.000,00	APBD
4. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Rp. 672.485.000,00	APBD
5. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber laut	Rp. 2.981.497.000,00	APBD
6. Program pengembangan budidaya perikanan	Rp. 16.028.515.400,00	APBD
7. Program pengembangan sumberdaya perikanan	Rp. 372.470.000,00	APBN (DAK)
8. pengolahan perikanan tangkap	Rp. 476.867.000,00	APBN (DAK)
9. pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya	Rp. 525.000.000.00	APBN (TP)

Pihak kedua

Pekanbaru, Februari 2017
Pihak pertama

H. ARSYDJULIANDI RACHMAN
Gubernur Riau

Ir. NAFILSON
NIP. 19651002 199403 1 006

SIMONEV (v 2.0.1) admin@kps Cetak Rekap Kegiatan APBD Dir												
https://monev.riau.go.id/bin/modul/laporan/apbd_skpd.php?do=print&sl												
No	Program Kegiatan	Pagu				Penyerapan Dana				Pelaksanaan Fisik (%)		
		Murni		Perubahan		Target		Realisasi SPJ		Target	Realisasi	Tertimbang
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%			
P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.000.000,00	0,05	33.000.000,00	0,07	28.500.000,00	86,36	20.850.000,00	63,18	70,20	73,18	0,05
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	750.000.000,00	1,15	819.839.468,00	1,72	809.339.468,00	98,72	625.537.508,00	76,30	90,53	86,30	1,49
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	247.500.000,00	0,38	259.800.000,00	0,55	259.800.000,00	100,00	230.530.000,00	88,73	91,38	98,73	0,54
4	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	166.800.000,00	0,26	178.800.000,00	0,38	149.314.200,00	83,51	178.800.000,00	100,00	90,00	100,00	0,38
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	107.800.000,00	0,17	107.800.000,00	0,23	96.100.000,00	89,15	94.967.000,00	88,10	95,00	98,00	0,22
6	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	145.000.000,00	0,22	145.000.000,00	0,31	127.797.500,00	88,14	104.810.000,00	72,28	100,00	82,28	0,25
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	55.500.000,00	0,09	55.500.000,00	0,12	55.500.000,00	100,00	55.350.000,00	99,73	100,00	100,00	0,12
8	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	554.055.000,00	0,85	554.055.000,00	1,17	554.055.000,00	100,00	524.625.700,00	94,69	100,00	100,00	1,17
9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	44.495.000,00	0,07	44.495.000,00	0,09	43.400.000,00	97,54	19.550.000,00	43,94	100,00	53,94	0,05
10	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	450.000.000,00	0,69	550.000.000,00	1,16	347.050.000,00	63,10	531.740.611,00	96,68	94,21	100,00	1,16
11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	75.000.000,00	0,11	75.000.000,00	0,16	71.500.000,00	95,33	59.800.000,00	79,73	99,88	89,73	0,14
12	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd	283.800.000,00	0,43	283.800.000,00	0,60	251.760.000,00	88,71	225.216.000,00	79,36	88,71	89,36	0,53
P Program Peningkatan Disiplin Aparatur												
13	Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur	97.317.000,00	0,15	97.317.000,00	0,20	97.317.000,00	100,00	87.008.500,00	89,41	90,00	98,00	0,20
14	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	181.800.000,00	0,28	91.220.000,00	0,19	91.220.000,00	100,00	-	-	-	-	-
P Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan												
15	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	178.100.000,00	0,27	178.100.000,00	0,37	178.100.000,00	100,00	169.675.000,00	95,27	92,07	98,00	0,37
16	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	121.000.000,00	0,19	121.000.000,00	0,25	99.016.000,00	81,83	84.477.800,00	69,82	100,00	79,82	0,20
17	Supervisi Dan Statistik	247.900.000,00	0,38	247.900.000,00	0,52	199.865.900,00	80,62	167.015.400,00	67,37	98,51	87,37	0,46
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	39.600.000,00	0,06	39.600.000,00	0,08	39.600.000,00	100,00	17.047.000,00	43,05	100,00	53,00	0,04

SIMONEV (v 2.0.1) admindkps												
Cetak Rekap Kegiatan APBD Dir												
https://monev.riau.go.id/bin/modul/laporan/apbd_skpd.php?do=print&sl												
16	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	121.000.000,00	0,19	121.000.000,00	0,25	99.016.000,00	81,83	84.477.800,00	69,82	100,00	79,82	0,20
17	Supervisi Dan Statistik	247.900.000,00	0,38	247.900.000,00	0,52	199.865.900,00	80,62	167.015.400,00	67,37	98,51	87,37	0,46
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	39.600.000,00	0,06	39.600.000,00	0,08	39.600.000,00	100,00	17.047.000,00	43,05	100,00	53,00	0,04
19	Penyusunan Rencana Kerja Skpd	47.770.000,00	0,07	47.770.000,00	0,10	45.468.000,00	95,18	36.160.400,00	75,70	97,46	85,70	0,09
20	Rapat Koordinasi Pada Setiap Skpd	148.948.000,00	0,23	198.948.000,00	0,42	148.948.000,00	74,87	176.858.000,00	88,90	100,00	100,00	0,42
P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
21	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	500.000.000,00	0,77	500.000.000,00	1,05	477.000.000,00	95,40	282.010.300,00	56,40	95,39	66,40	0,70
P Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur												
22	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	558.650.000,00	0,86	257.650.000,00	0,54	196.650.000,00	76,32	255.741.000,00	99,26	97,20	100,00	0,54
23	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	100.000.000,00	0,15	669.360.000,00	1,41	110.360.000,00	16,49	622.781.000,00	93,04	100,00	100,00	1,41
24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	124.800.000,00	0,19	124.800.000,00	0,26	124.800.000,00	100,00	79.350.499,00	63,58	100,00	73,58	0,19
25	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100.700.000,00	0,15	100.700.000,00	0,21	100.700.000,00	100,00	82.650.000,00	82,08	100,00	92,08	0,20
26	Pengadaan Meubeleur	-	-	1.832.839.875,00	3,86	-	-	1.733.149.000,00	94,56	100,00	100,00	3,86
P Program Perencanaan Tata Ruang												
27	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil	285.967.000,00	0,44	285.967.000,00	0,60	285.967.000,00	100,00	152.869.600,00	53,46	100,00	75,00	0,45
P Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut												
28	Pembinaan Dan Pemberdayaan Serta Penilaian Pokmaswas	328.148.000,00	0,50	328.148.000,00	0,69	328.148.000,00	100,00	254.469.000,00	77,55	100,00	100,00	0,69
29	Gelar Operasi Dan Pengawasan Terpadu	763.000.000,00	1,17	763.000.000,00	1,60	738.200.000,00	96,75	655.323.500,00	85,89	100,00	95,89	1,54
30	Peningkatan Operasional Dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	379.082.000,00	0,58	379.082.000,00	0,80	379.082.000,00	100,00	365.341.500,00	96,38	100,00	100,00	0,80
31	Pembangunan Pos Pengawas	200.000.000,00	0,31	200.000.000,00	0,42	199.110.000,00	99,56	193.595.000,00	96,80	100,00	100,00	0,42
32	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (dak)	1.311.267.000,00	2,01	1.311.267.000,00	2,76	1.311.267.000,00	100,00	1.222.777.500,00	93,25	100,00	100,00	2,76
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber												

SIMONEV (v 2.0.1) | admin@kps... Cetak Rekap Kegiatan APBD Di...

https://monev.riau.go.id/bin/modul/laporan/apbd_skpd.php?do=print&...

31	Pembangunan Pos Pengawas	200.000.000,00	0,31	200.000.000,00	0,42	199.110.000,00	99,56	193.595.000,00	96,80	100,00	100,00	0,42
32	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (dak)	1.311.267.000,00	2,01	1.311.267.000,00	2,76	1.311.267.000,00	100,00	1.222.777.500,00	93,25	100,00	100,00	2,76
P Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam												
33	Penyusunan Pecadangan Kawasan Konservasi	284.355.000,00	0,44	284.355.000,00	0,60	265.305.000,00	93,30	210.677.900,00	74,09	86,60	97,00	0,58
34	Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove	388.130.000,00	0,59	388.130.000,00	0,82	388.130.000,00	100,00	355.063.572,00	91,48	100,00	100,00	0,82
P Program Pengembangan Budidaya Perikanan												
35	Pengelolaan Perizinan Perikanan Budidaya Di Provinsi Riau	368.270.000,00	0,56	368.270.000,00	0,77	366.740.000,00	99,58	256.372.800,00	69,62	94,34	78,00	0,60
36	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	427.470.000,00	0,66	427.470.000,00	0,90	426.850.000,00	99,85	420.071.400,00	98,27	99,85	100,00	0,90
37	Pembinaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	500.000.000,00	0,77	500.000.000,00	1,05	468.330.000,00	93,67	417.158.500,00	83,43	93,44	93,68	0,99
38	Monitoring Dan Evaluasi Budidaya Perikanan	242.130.000,00	0,37	242.130.000,00	0,51	241.430.000,00	99,71	237.318.200,00	98,01	100,00	100,00	0,51
39	Pembinaan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima Bantuan Pump Pb	230.254.000,00	0,35	230.254.000,00	0,48	230.054.000,00	99,91	226.477.459,00	98,36	99,91	100,00	0,48
40	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	196.610.000,00	0,30	196.610.000,00	0,41	196.610.000,00	100,00	129.005.895,05	65,62	100,00	100,00	0,41
41	Pembenihan Ikan Langka/lokal Yang Mempunyai Nilai Ekonomis Tinggi	1.721.227.400,00	2,64	1.496.969.400,00	3,15	1.482.979.400,00	99,07	1.406.094.000,00	93,93	100,00	98,00	3,09
42	Pembinaan Dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan	291.450.000,00	0,45	291.450.000,00	0,61	291.450.000,00	100,00	247.265.114,00	84,84	100,00	100,00	0,61
43	Peningkatan Sistem Dan Cara Pengelolaan Laboratorium Upt Pembenihan	170.000.000,00	0,26	170.000.000,00	0,36	170.000.000,00	100,00	167.063.000,00	98,27	100,00	100,00	0,36
44	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Pembenihan Perikanan	530.000.000,00	0,81	501.258.000,00	1,05	498.800.000,00	99,51	469.675.550,00	93,70	100,00	98,00	1,03
45	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Dan Kinerja Uptd Se- Provinsi Riau	400.000.000,00	0,61	400.000.000,00	0,84	400.000.000,00	100,00	352.673.800,00	88,17	100,00	95,00	0,80
46	Peningkatan Pelayanan Kinerja Upt. Pembenihan	1.450.000.000,00	2,22	1.450.000.000,00	3,05	1.450.000.000,00	100,00	984.676.750,00	67,91	100,00	97,00	2,96
47	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Pembenihan (dak)	1.900.000.000,00	2,91	1.900.000.000,00	4,00	1.900.000.000,00	100,00	1.403.789.787,00	73,88	100,00	100,00	4,00
48	Revitalisasi Kawasan Budidaya Air Laut, Payau Dan	782.164.000,00	1,20	-	0,00	780.914.000,00	0,00	-	-	-	-	-

14:32 22/02/2018

SIMONEV (v 2.0.1) admin@kps.riau.go.id													
Cetak Rekap Kegiatan APBD Di...													
https://monev.riau.go.id/bin/modul/laporan/apbd_skpd.php?do=print&...													
46	Peningkatan Pelayanan Kinerja Upt. Pembenihan	1.450.000.000,00	2,22	1.450.000.000,00	3,05	1.450.000.000,00	100,00	984.676.750,00	67,91	100,00	97,00	2,96	
47	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Pembenihan (dak)	1.900.000.000,00	2,91	1.900.000.000,00	4,00	1.900.000.000,00	100,00	1.403.789.787,00	73,88	100,00	100,00	4,00	
48	Revitalisasi Kawasan Budidaya Air Laut, Payau Dan Tawar	782.164.000,00	1,20	-	0,00	780.914.000,00	0,00	-	-	-	-	-	
49	Pengembangan Prasarana Dan Sarana Perikanan Budidaya	9.087.210.000,00	13,93	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
50	Identifikasi Dan Verifikasi Calon Penerima Hibah Tahun 2018	-	-	150.000.000,00	0,32	-	-	-	-	-	-	-	
P Program Pengembangan Perikanan Tangkap													
51	Pembinaan Dan Operasional Forum Kub Perikanan Tangkap	200.000.000,00	0,31	200.000.000,00	0,42	197.600.000,00	98,80	174.230.800,00	87,12	100,00	97,12	0,41	
52	Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodalan Perikanan Tangkap	463.290.000,00	0,71	463.290.000,00	0,97	455.215.000,00	98,26	397.184.200,00	85,73	100,00	95,73	0,93	
53	Pemulihan Sumberdaya Ikan Di Perairan Umum	456.975.000,00	0,70	906.975.000,00	1,91	459.945.000,00	50,71	811.954.200,00	89,52	100,00	97,52	1,86	
54	Pengelolaan Perairan Teritorial Di Wpp	294.850.000,00	0,45	294.850.000,00	0,62	287.650.000,00	97,56	239.310.450,00	81,16	100,00	91,16	0,57	
55	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap Di Provinsi Riau	474.820.000,00	0,73	474.820.000,00	1,00	471.120.000,00	99,22	418.939.700,00	88,23	100,00	98,23	0,98	
56	Peningkatan Kapasitas Dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak	275.675.000,00	0,42	373.595.000,00	0,79	275.675.000,00	73,79	373.595.000,00	100,00	100,00	100,00	0,79	
P Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan													
57	Pengembangan Nilai Produk Pengolahan Hasil Perikanan	350.000.000,00	0,54	350.000.000,00	0,74	350.000.000,00	100,00	297.953.900,00	85,13	100,00	95,00	0,70	
58	Lomba Dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan (upi) Dan Umkm Terbaik Se Provinsi Riau	270.000.000,00	0,41	270.000.000,00	0,57	270.000.000,00	100,00	260.606.800,00	96,52	100,00	100,00	0,57	
59	Pendampingan Usaha Umkm Pengolahan Hasil Perikanan Dengan Pengusaha Pemasaran	200.000.000,00	0,31	200.000.000,00	0,42	200.000.000,00	100,00	186.199.500,00	93,10	100,00	100,00	0,42	
60	Pembinaan Dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi Umkm Pengolahan Hasil Perikanan	200.000.000,00	0,31	200.000.000,00	0,42	200.000.000,00	100,00	176.326.913,00	88,16	100,00	98,00	0,41	
61	Pameran/bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	500.000.000,00	0,77	500.000.000,00	1,05	500.000.000,00	100,00	477.089.400,00	95,42	100,00	100,00	1,05	
62	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	725.330.000,00	1,11	725.330.000,00	1,53	725.330.000,00	100,00	665.568.200,00	91,76	100,00	100,00	1,53	

SIMONEV (v 2.0.1) | admin@kps
Cetak Rekap Kegiatan APBD Dir

https://monev.riau.go.id/bin/modul/laporan/apbd_skpd.php?do=print&sl
Search

59	Pendampingan Usaha Umkm Pengolahan Hasil Perikanan Dengan Pengusaha Pemasaran	200.000.000,00	0,31	200.000.000,00	0,42	200.000.000,00	100,00	186.199.500,00	93,10	100,00	100,00	0,42
60	Pembinaan Dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi Umkm Pengolahan Hasil Perikanan	200.000.000,00	0,31	200.000.000,00	0,42	200.000.000,00	100,00	176.326.913,00	88,16	100,00	98,00	0,41
61	Pameran/bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	500.000.000,00	0,77	500.000.000,00	1,05	500.000.000,00	100,00	477.089.400,00	95,42	100,00	100,00	1,05
62	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	725.330.000,00	1,11	725.330.000,00	1,53	725.330.000,00	100,00	665.568.200,00	91,76	100,00	100,00	1,53
63	Sosialisasi Gemarikan Melalui Media Elektronik Dan Cetak	209.000.000,00	0,32	209.000.000,00	0,44	209.000.000,00	100,00	202.291.200,00	96,79	100,00	100,00	0,44
64	Peningkatan Kapasitas Dan Operasional Lppmhp Prov Riau	433.720.000,00	0,66	483.720.000,00	1,02	446.755.000,00	92,36	476.536.437,00	98,51	100,00	99,80	1,02
P Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Dan Kelautan												
65	Peningkatan Pelayanan Kinerja Upt Pelatihan Perikanan	1.290.800.000,00	1,98	1.290.800.000,00	2,72	1.290.800.000,00	100,00	1.023.463.600,00	79,29	90,68	91,31	2,48
66	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Pelatihan	2.500.000.000,00	3,83	663.840.000,00	1,40	-	-	612.993.650,00	92,34	99,12	99,26	1,39
67	Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau	400.000.000,00	0,61	400.000.000,00	0,84	400.000.000,00	100,00	379.144.400,00	94,79	100,00	100,00	0,84
P Belanja Tidak Langsung												
68	Belanja Gaji Dan Tunjangan	19.089.881.144,00	29,26	10.286.761.144,00	21,64	6.857.840.795,00	66,67	7.985.207.868,00	77,63	-	77,66	16,80
69	Belanja Tambahan Belanja Penghasilan PNS	9.315.108.000,00	14,28	9.367.968.000,00	19,71	4.683.984.000,00	50,00	8.073.894.794,00	86,19	-	86,19	16,98
Jumlah		65.245.718.544,00	100,00	47.539.603.887,00	100,00	34.590.373.513,00	72,76	39.825.951.557,05	83,77	97,69	93,23	89,72

Pekanbaru, Desember 2017
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU

Ir. HERMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
19630512 199303 1 006

14:33
22/02/2018

SIMONEV (v 2.0.1) | adm

Secure | https://monev.riau.go.id/rekap-apbd/

SIMONEV

Rudi Andika, S.Pi

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

Sudah Tayang

Unit Kerja : Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pelaksanaan Per : Desember 2017 BL dan BTL
Pagu Murni : Rp. 65.245.718.544,00 Pagu Perubahan : Rp. 47.539.603.887,00
Pagu terakhir : Rp. 47.539.603.887,00
Target Penyerapan Dana : Rp. 34.590.373.513,00 (72,76 %) Resalisasi SPJ : Rp. 39.825.951.557,05 (83,77 %)
Pelaksanaan Fisik : Target : 97,69 % || Realisasi : 93,23 % || Tertimbang : 89,72 %

Pagu di Sistem Keuangan
Rp. 0,00

No	Program Kegiatan	Pagu				Penyerapan Dana				Pelaksanaan Fisik (%)		
		Murni		Perubahan		Target		Realisasi SPJ		Target Realisasi Tertimbang		
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%			
P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.000.000,00	0,05	33.000.000,00	0,07	28.500.000,00	86,36	20.850.000,00	63,18	70,20	73,18	0,05
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	750.000.000,00	1,15	819.839.468,00	1,72	809.339.468,00	98,72	625.537.508,00	76,30	90,53	86,30	1,49
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	247.500.000,00	0,38	259.800.000,00	0,55	259.800.000,00	100,00	230.530.000,00	88,73	91,38	98,73	0,54
4	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	166.800.000,00	0,26	178.800.000,00	0,38	149.314.200,00	83,51	178.800.000,00	100,00	90,00	100,00	0,38
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	107.800.000,00	0,17	107.800.000,00	0,23	96.100.000,00	89,15	94.967.000,00	88,10	95,00	98,00	0,22
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	145.000.000,00	0,22	145.000.000,00	0,31	127.797.500,00	88,14	104.810.000,00	72,28	100,00	82,28	0,25
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	55.500.000,00	0,09	55.500.000,00	0,12	55.500.000,00	100,00	55.350.000,00	99,73	100,00	100,00	0,12
8	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	554.055.000,00	0,85	554.055.000,00	1,17	554.055.000,00	100,00	524.625.700,00	94,69	100,00	100,00	1,17
9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	44.495.000,00	0,07	44.495.000,00	0,09	43.400.000,00	97,54	19.550.000,00	43,94	100,00	53,94	0,05
10	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	450.000.000,00	0,69	550.000.000,00	1,16	347.050.000,00	63,10	531.740.611,00	96,68	94,21	100,00	1,16
11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	75.000.000,00	0,11	75.000.000,00	0,16	71.500.000,00	95,33	59.800.000,00	79,73	99,88	89,73	0,14
12	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd	283.800.000,00	0,43	283.800.000,00	0,60	251.760.000,00	88,71	225.216.000,00	79,36	88,71	89,36	0,53

08.56
29/01/2018

SIMONEV (v 2.0.1) | adm

Secure | https://monev.riau.go.id/rekap-apbd/

SIMONEV

Rudi Andika, S.Pi

P Program Peningkatan Disiplin Aparatur												
13 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur	97.317.000,00	0,15	97.317.000,00	0,20	97.317.000,00	100,00	87.008.500,00	89,41	90,00	98,00	0,20	
14 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	181.800.000,00	0,28	91.220.000,00	0,19	91.220.000,00	100,00	-	-	-	-	-	
P Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan												
15 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	178.100.000,00	0,27	178.100.000,00	0,37	178.100.000,00	100,00	169.675.000,00	95,27	92,07	98,00	0,37	
16 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	121.000.000,00	0,19	121.000.000,00	0,25	99.016.000,00	81,83	84.477.800,00	69,82	100,00	79,82	0,20	
17 Supervisi Dan Statistik	247.900.000,00	0,38	247.900.000,00	0,52	199.865.900,00	80,62	167.015.400,00	67,37	98,51	87,37	0,46	
18 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	39.600.000,00	0,06	39.600.000,00	0,08	39.600.000,00	100,00	17.047.000,00	43,05	100,00	53,00	0,04	
19 Penyusunan Rencana Kerja Skpd	47.770.000,00	0,07	47.770.000,00	0,10	45.468.000,00	95,18	36.160.400,00	75,70	97,46	85,70	0,09	
20 Rapat Koordinasi Pada Setiap Skpd	148.948.000,00	0,23	198.948.000,00	0,42	148.948.000,00	74,87	176.858.000,00	88,90	100,00	100,00	0,42	
P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
21 Pendidikan Dan Pelatihan Formal	500.000.000,00	0,77	500.000.000,00	1,05	477.000.000,00	95,40	282.010.300,00	56,40	95,39	66,40	0,70	
P Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur												
22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	558.650.000,00	0,86	257.650.000,00	0,54	196.650.000,00	76,32	255.741.000,00	99,26	97,20	100,00	0,54	
23 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	100.000.000,00	0,15	669.360.000,00	1,41	110.360.000,00	16,49	622.781.000,00	93,04	100,00	100,00	1,41	
24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	124.800.000,00	0,19	124.800.000,00	0,26	124.800.000,00	100,00	79.350.499,00	63,58	100,00	73,58	0,19	
25 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100.700.000,00	0,15	100.700.000,00	0,21	100.700.000,00	100,00	82.650.000,00	82,08	100,00	92,08	0,20	
26 Pengadaan Meubeleor	-	-	1.832.839.875,00	3,86	-	-	1.733.149.000,00	94,56	100,00	100,00	3,86	
P Program Perencanaan Tata Ruang												
27 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil	285.967.000,00	0,44	285.967.000,00	0,60	285.967.000,00	100,00	152.869.600,00	53,46	100,00	75,00	0,45	
P Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut												
28 Pembinaan Dan Pemberdayaan Serta Penilaian Pokmaswas	328.148.000,00	0,50	328.148.000,00	0,69	328.148.000,00	100,00	254.469.000,00	77,55	100,00	100,00	0,69	
29 Gelar Operasi Dan Pengawasan Terpadu	763.000.000,00	1,17	763.000.000,00	1,60	738.200.000,00	96,75	655.323.500,00	85,89	100,00	95,89	1,54	
30 Peningkatan Operasional Dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	379.082.000,00	0,58	379.082.000,00	0,80	379.082.000,00	100,00	365.341.500,00	96,38	100,00	100,00	0,80	
31 Pembangunan Pos Pengawas	200.000.000,00	0,31	200.000.000,00	0,42	199.110.000,00	99,56	193.595.000,00	96,80	100,00	100,00	0,42	

08.56
29/01/2018

SIMONEV (v 2.0.1) | admin

Secure | https://monev.riau.go.id/rekap-apbd/

SIMONEV

Rudi Andika, S.Pi

32	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (dak)	1.311.267.000,00	2,01	1.311.267.000,00	2,76	1.311.267.000,00	100,00	1.222.777.500,00	93,25	100,00	100,00	2,76
P Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam												
33	Penyusunan Pecadangan Kawasan Konservasi	284.355.000,00	0,44	284.355.000,00	0,60	265.305.000,00	93,30	210.677.900,00	74,09	86,60	97,00	0,58
34	Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove	388.130.000,00	0,59	388.130.000,00	0,82	388.130.000,00	100,00	355.063.572,00	91,48	100,00	100,00	0,82
P Program Pengembangan Budidaya Perikanan												
35	Pengelolaan Perizinan Perikanan Budidaya Di Provinsi Riau	368.270.000,00	0,56	368.270.000,00	0,77	366.740.000,00	99,58	256.372.800,00	69,62	94,34	78,00	0,60
36	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	427.470.000,00	0,66	427.470.000,00	0,90	426.850.000,00	99,85	420.071.400,00	98,27	99,85	100,00	0,90
37	Pembinaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	500.000.000,00	0,77	500.000.000,00	1,05	468.330.000,00	93,67	417.158.500,00	83,43	93,44	93,68	0,99
38	Monitoring Dan Evaluasi Budidaya Perikanan	242.130.000,00	0,37	242.130.000,00	0,51	241.430.000,00	99,71	237.318.200,00	98,01	100,00	100,00	0,51
39	Pembinaan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima Bantuan Pump Pb	230.254.000,00	0,35	230.254.000,00	0,48	230.054.000,00	99,91	226.477.459,00	98,36	99,91	100,00	0,48
40	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	196.610.000,00	0,30	196.610.000,00	0,41	196.610.000,00	100,00	129.005.895,05	65,62	100,00	100,00	0,41
41	Pembenihan Ikan Langka/lokal Yang Mempunyai Nilai Ekonomis Tinggi	1.721.227.400,00	2,64	1.496.969.400,00	3,15	1.482.979.400,00	99,07	1.406.094.000,00	93,93	100,00	98,00	3,09
42	Pembinaan Dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan	291.450.000,00	0,45	291.450.000,00	0,61	291.450.000,00	100,00	247.265.114,00	84,84	100,00	100,00	0,61
43	Peningkatan Sistem Dan Cara Pengelolaan Laboratorium Upt Pembenihan	170.000.000,00	0,26	170.000.000,00	0,36	170.000.000,00	100,00	167.063.000,00	98,27	100,00	100,00	0,36
44	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Pembenihan Perikanan	530.000.000,00	0,81	501.258.000,00	1,05	498.800.000,00	99,51	469.675.550,00	93,70	100,00	98,00	1,03
45	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Dan Kinerja Uptd Se-Provinsi Riau	400.000.000,00	0,61	400.000.000,00	0,84	400.000.000,00	100,00	352.673.800,00	88,17	100,00	95,00	0,80
46	Peningkatan Pelayanan Kinerja Upt. Pembenihan	1.450.000.000,00	2,22	1.450.000.000,00	3,05	1.450.000.000,00	100,00	984.676.750,00	67,91	100,00	97,00	2,96
47	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Pembenihan (dak)	1.900.000.000,00	2,91	1.900.000.000,00	4,00	1.900.000.000,00	100,00	1.403.789.787,00	73,88	100,00	100,00	4,00
48	Revitalisasi Kawasan Budidaya Air Laut, Payau Dan Tawar	782.164.000,00	1,20	-	0,00	780.914.000,00	0,00	-	-	-	-	-
49	Pengembangan Prasarana Dan Sarana Perikanan Budidaya	9.087.210.000,00	13,93	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
50	Identifikasi Dan Verifikasi Calon Penerima Hibah Tahun 2018	-	-	150.000.000,00	0,32	-	-	-	-	-	-	-

08.57
29/01/2018

SIMONEV (v 2.0.1) | admin

Secure | https://monev.riau.go.id/rekap-apbd/

SIMONEV

Rudi Andika, S.Pi

P Program Pengembangan Perikanan Tangkap												
51	Pembinaan Dan Operasional Forum Kub Perikanan Tangkap	200.000.000,00	0,31	200.000.000,00	0,42	197.600.000,00	98,80	174.230.800,00	87,12	100,00	97,12	0,41
52	Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodalan Perikanan Tangkap	463.290.000,00	0,71	463.290.000,00	0,97	455.215.000,00	98,26	397.184.200,00	85,73	100,00	95,73	0,93
53	Pemulihan Sumberdaya Ikan Di Perairan Umum	456.975.000,00	0,70	906.975.000,00	1,91	459.945.000,00	50,71	811.954.200,00	89,52	100,00	97,52	1,86
54	Pengelolaan Perairan Teritorial Di Wpp	294.850.000,00	0,45	294.850.000,00	0,62	287.650.000,00	97,56	239.310.450,00	81,16	100,00	91,16	0,57
55	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap Di Provinsi Riau	474.820.000,00	0,73	474.820.000,00	1,00	471.120.000,00	99,22	418.939.700,00	88,23	100,00	98,23	0,98
56	Peningkatan Kapasitas Dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak	275.675.000,00	0,42	373.595.000,00	0,79	275.675.000,00	73,79	373.595.000,00	100,00	100,00	100,00	0,79
P Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan												
57	Pengembangan Nilai Produk Pengolahan Hasil Perikanan	350.000.000,00	0,54	350.000.000,00	0,74	350.000.000,00	100,00	297.953.900,00	85,13	100,00	95,00	0,70
58	Lomba Dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan (upi) Dan Umkm Terbaik Se Provinsi Riau	270.000.000,00	0,41	270.000.000,00	0,57	270.000.000,00	100,00	260.606.800,00	96,52	100,00	100,00	0,57
59	Pendampingan Usaha Umkm Pengolahan Hasil Perikanan Dengan Pengusaha Pemasaran	200.000.000,00	0,31	200.000.000,00	0,42	200.000.000,00	100,00	186.199.500,00	93,10	100,00	100,00	0,42
60	Pembinaan Dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi Umkm Pengolahan Hasil Perikanan	200.000.000,00	0,31	200.000.000,00	0,42	200.000.000,00	100,00	176.326.913,00	88,16	100,00	98,00	0,41
61	Pameran/bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	500.000.000,00	0,77	500.000.000,00	1,05	500.000.000,00	100,00	477.089.400,00	95,42	100,00	100,00	1,05
62	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	725.330.000,00	1,11	725.330.000,00	1,53	725.330.000,00	100,00	665.568.200,00	91,76	100,00	100,00	1,53
63	Sosialisasi Gemarikan Melalui Media Elektronik Dan Cetak	209.000.000,00	0,32	209.000.000,00	0,44	209.000.000,00	100,00	202.291.200,00	96,79	100,00	100,00	0,44
64	Peningkatan Kapasitas Dan Operasional Lppmhp Prov Riau	433.720.000,00	0,66	483.720.000,00	1,02	446.755.000,00	92,36	476.536.437,00	98,51	100,00	99,80	1,02
P Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Dan Kelautan												
65	Peningkatan Pelayanan Kinerja Upt Pelatihan Perikanan	1.290.800.000,00	1,98	1.290.800.000,00	2,72	1.290.800.000,00	100,00	1.023.463.600,00	79,29	90,68	91,31	2,48
66	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Upt Pelatihan	2.500.000.000,00	3,83	663.840.000,00	1,40	-	-	612.993.650,00	92,34	99,12	99,26	1,39
67	Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau	400.000.000,00	0,61	400.000.000,00	0,84	400.000.000,00	100,00	379.144.400,00	94,79	100,00	100,00	0,84
P Belanja Tidak Langsung												
68	Belanja Gaji Dan Tunjangan	19.089.881.144,00	29,26	10.286.761.144,00	21,64	6.857.840.795,00	66,67	7.985.207.868,00	77,63	-	77,66	16,80

08.57
29/01/2018